

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN MINAPOLITAN DI KAB. GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO**

**Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun**

**DR. SUKARMAN KAMULI, M.Si, NIDN: 0006066707 (Ketua)**

**DR. RAUF HATU, M.Si, NIDN : 0016126307 (Anggota)**

**DRS. RUSLI ISA, M.Si: NIDN: 0006076604 (Anggota)**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOVEMBER 2015**

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GORONTALO  
UTARA PROVINSI GORONTALO**

**Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun**

**DR. SUKARMAN KAMULI, M.Si, NIDN: 0006066707 (Ketua)**

**DR. RAUF HATU, M.Si, NIDN: 0016126307 (Anggota)**

**DRS. RUSLI ISA, M.Si: NIDN: 0006076604 (Anggota)**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**NOVEMBER 2015**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI  
KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI  
GORONTALO

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr. SUKARMAN KAMULI M.Si  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo  
NIDN : 0006066707  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Nomor HP : 085240216450  
Alamat surel (e-mail) : sukarman\_kamuli@ung.ac.id


**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Dr. RAUF A HATU M.Si.  
NIDN : 0016126307  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : Drs RUSLI ISA M.Si  
NIDN : 0006076604  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo  
Institusi Mitra (jika ada) : -  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 72.500.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp 149.650.500,00


Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



(Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si)  
NIP/NIK 196609031996031001




Gorontalo, 9 - 11 - 2015  
Ketua,




(Dr. SUKARMAN KAMULI M.Si)  
NIP/NIK 196706062000031001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian



(Prof. Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd)  
NIP/NIK 196111141987031002



## RINGKASAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara. Kajian ini dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek *Effectiveness*: ketepatan program. *Efficiency*: hasil yang dicapai. *Adequacy*: kesesuaian antara rencana program dengan kondisi kawasan; *Equaty*: pemberian kesempatan kepada kelompok sasaran. *Responsiveness*: ketanggapan antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Sedangkan *appropriateness*: harapan dan manfaat yang diperoleh oleh pelaksana program dan kelompok sasaran.

Aspek-aspek tersebut telah memenuhi dari perspektif implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang diperoleh pada proses penelitian tahap 1 (satu) melalui wawancara secara mendalam, dan proses penelitian tahap 2 (dua) yang dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) terungkap hal-hal sebagai berikut: *pertama*, Sinergitas POKJA sebagai penanggungjawab kebijakan pengembangan kawasan minapolitan belum maksimal, masing-masing belum saling berkoordinasi sebagai bentuk tanggungjawab sesuai amanah POKJA itu sendiri. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorut justru yang paling dominan dalam mengawal kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. *Kedua*, belum ada lembaga yang dapat memberi kemudahan pada nelayan untuk memperoleh fasilitas pinjaman modal seperti BRI sebagai Bank pemerintah. Hal ini terkendala pada “Barang Jaminan” sebagai syarat memperoleh pinjaman. *Ketiga*, kondisi lingkungan pesisir dan pantai di kawasan minapolitan yang semakin rusak, sehingga tidak dapat menyangga keberlanjutan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan.

Beberapa temuan penelitian tersebut perlu disikapi secara komprehensif oleh semua stakeholders agar kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara tetap menjadi suatu kawasan yang memberi dampak pada masyarakat nelayan secara khusus dan masyarakat Gorontalo Utara pada umumnya. Disamping itu pula keterlibatan nelayan itu sendiri tetap menjadi prioritas, artinya mereka harus diberdayakan dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka sendiri. Kalangan Perguruan Tinggi tetap diperlukan sebagai unsur pemberi kontribusi pemikiran melalui riset-riset dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah sebagai suatu pilihan.

## PRAKATA

Puji syukur patut dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas izinNya lah penyusunan laporan penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo dapat dalam dua tahap penelitian (2014 dan 2015) berhasil dirampungkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari partisipasi pihak-pihak yang telah memberikan informasi dan data khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, dan anggota Kelompok Kerja (POJKA) serta anggota nelayan minapolitan yang tersebar di kawasan minapolitan. Patut kami peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala partisipasinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang telah diimplementasikan sejak tahun 2008 yang lalu hingga tahun 2015 ini. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dikaji dari beberapa aspek, yaitu *Effectiveness*: ketepatan program. *Efficiency*: hasil yang dicapai. *Adequacy*: kesesuaian antara rencana program dengan kondisi kawasan; *Equaty*: pemberian kesempatan kepada kelompok sasaran. *Responsiveness*: ketanggapan antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Sedangkan *appropriateness*: harapan dan manfaat yang diperoleh oleh pelaksana program dan kelompok sasaran

Kami menyadari bahwa informasi yang kami tuangkan dalam penelitian ini berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah dibatasi sebelumnya dan data yang ada berdasarkan “apa adanya” yang telah kami peroleh. Penelitian diharapkan menjadi informasi bagi para penentu kebijakan khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara dalam menentukan langkah-langkah strategis berikutnya dalam menata ulang kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo. Icon sebagai kota ikan yang menjadi substansi kebijakan tersebut perlu diwujudkan, sehingga Gorontalo Utara ke depan menampakkan jati dirinya sebagai

kawasan “Minapolitan” yang diandalkan dan tetap mempertimbangan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menjadi musibah dikemudian hari.

Dalam upaya mewujudkan-nyatakan hasil penelitian ini pada dasarnya akan sangat tergantung pada “*Political will Pemerintah*” Gorontalo Utara sendiri. Hal ini sangat mendasar karena: 1) pemerintah daerah berdasarkan amanah UU tentang pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan menata daerahnya menjadi lebih baik dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada; 2) pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan Renstra Daerah bersama lembaga legislative dalam hal ini DPRD Gorontalo Utara sehingga kebijakan yang sudah diawali dan menyerap anggaran yang cukup besar dapat berkesinambungan dilaksanakan. Orientasinya adalah masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Semoga hasil penelitian ini menjadi referensi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menentukan kebijakan berikutnya, seperti melakukan kajian dalam mengatur keseimbangan kawasan. Milsanya melakukan membuat PERDA tentang Kawasan Pesisir dan Pantai, Penghijauan atau Reboisasi besar-besaran, dan lain sebagainya. Terima kasih

Gorontalo, November 2015

Tim Peneliti:

Dr. Sukarman Kamuli, M.Si  
Dr. Rauf Hatu, M.Si  
Drs. Rusli Isa, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman pengesahan</b> .....	ii
<b>Ringkasan</b> .....	iii
<b>Prakata</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>Daftar Lampiran</b> .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	12
BAB IV METODE PENELITIAN .....	13
BAB V HASIL YANG DICAPAI .....	15
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	49

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Potensi Budidaya dan Pemanfaatannya .....	16
2. Target Produksi Per Komoditas Unggulan .....	17
3. Realisasi Produksi Per Komoditas Tahun 2012 Sampai Triwulan III Tahun 2013 .....	17
4. Data Kelompok Di Kawasan Minapolitan .....	18
5. Jenis Kegiatan Minapolitan Dan Sumber Pembiayaan .....	19
6. Perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan minapolitan .....	20
7. Kebutuhan induk dan benih di kawasan minapolitan Tahun 2011 .....	20
8. Kebutuhan induk dan benih di kawasan minapolitan Tahun 2012 .....	21
9. Kebutuhan Induk Dan Benih Di Kawasan Minapolitan Tahun 2013 .....	21
10. Kebutuhan Induk Dan Benih Di Kawasan Minapolitan Tahun 2013.....	21



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Hal</b>
Roadmap Penelitian	.....	11

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Hal</b>
1. Surat Rekomendasi Penelitian .....	38
2. SK POKJA Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah otonom baru yang ada di provinsi Gorontalo dan merupakan daerah hasil pemekaran dari kabupaten Gorontalo pada tahun 2007 yang lalu. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar, diantaranya ialah potensi sumberdaya alam pesisir-laut dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut tergambar dari panjang garis pantai 198,00 Km<sup>2</sup> yang menjadi garis pantai terpanjang di provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudra Pasifik, dan secara geografis lebih dari 75% wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah pesisir.<sup>1</sup>

Sumber daya perikanan meliputi sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya meliputi budidaya air laut, air payau, dan air tawar. Berdasarkan data yang ada, bahwa sumber daya perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup besar, baik potensi perikanan tangkap maupun potensi perikanan budidaya. Potensi perikanan tangkap mencapai  $\pm 630.110$  ton, sementara yang baru dimanfaatkan sekitar  $\pm 237.110$  ton. Artinya potensi perikanan tangkap yang dimanfaatkan hanya sekitar 37,61% dari potensi sumber daya yang ada. Hal ini berarti sekitar 62,39% potensi perikanan tangkap belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal. Potensi perikanan tangkap tersebut meliputi berbagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: pelagis besar, pelagis kecil, demersal, udang penaeid, ikan karang, lobster, dan cumi-cumi.

Selanjutnya potensi perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari potensi hamparan yang memungkinkan dikembangkannya tiga jenis budidaya yang memiliki prospek yang meliputi budidaya laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar. Potensi budidaya laut seluas  $\pm 6.400$  Ha, yang meliputi: a) budidaya rumput laut:  $\pm 3482$  Ha, b) budidaya kerang mutiara  $\pm 2918$  Ha. Selanjutnya potensi budidaya air payau (tambak) dengan luas  $\pm 591$  Ha dan budidaya air tawar (kolam)  $\pm 142,5$  Ha.

---

<sup>1</sup> Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2008

Memperhatikan potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, maka Bupati Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 153 tahun 2008 tentang penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan tersebut meliputi: Kecamatan Anggrek sebagai kawasan Minapolis (sentral) dan kawasan Kecamatan Kwandang, serta Sumalata sebagai kawasan Hinterland (Penyangga). Kawasan tersebut memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu posisi pantai yang tidak langsung berhadapan dengan laut terbuka tetapi dibatasi oleh pulau-pulau kecil sebagai pemecah ombak, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan berbagai budidaya. Oleh karena itu dengan pengembangan lokasi tersebut, maka tujuan kebijakan Bupati tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh para nelayan khususnya nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan minapolitan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Para nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan minapolitan memperoleh berbagai fasilitas seperti: perahu yang tadinya tidak bermotor menjadi perahu bermotor, alat penangkap ikan (pancing, pukot, jala, payang, pukot cincin, pukot pantai, purse seine (jaring), bagan, pukot cang (pancing), sero, bubu, buorami), *cool box*, teropong, kompas, dan lain-lain. Fasilitas lainnya seperti adanya pangkalan BBM, perbengkelan dan suku cadang, WASERDA yang menyediakan kebutuhan pokok nelayan, dan pabrik es balok, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pendaratan dan Pelelangan Ikan (PPI). Ketersediaan berbagai fasilitas tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan nelayan pada berbagai kebutuhannya yang sebelumnya jauh dari jangkauan mereka.

Hal yang sangat mengganjal dalam setiap kebijakan yang diimplementasikan pada umumnya terletak pada keterbatasan kelompok sasaran. Keterbatasan tersebut meliputi: 1) SDM yang masih rendah; 2) penguasaan teknologi peralatan tangkap yang masih rendah; 3) kemampuan penanganan dan pengolahan hasil-hasil komoditas perikanan yang masih rendah; 4) terbatasnya sarana dan prasarana; dan 5) perilaku masyarakat nelayan yang berorientasi konsumtif.<sup>2</sup> Berbagai keterbatasan tersebut perlu dicari solusinya untuk

---

<sup>2</sup> Dahuri. **KOMPAS**, Rabu 22 Oktober 2006

mengangkat kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri, sehingga masyarakat nelayan tidak dalam posisi kehidupan yang *the poorest of the poor*.<sup>3</sup>

Pertimbangan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan minapolitan karena: 1) Potensi perikanan dan kelautan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara secara geografis memungkinkan dikembangkan sebagai suatu kawasan minapolitan, dan sangat prospektif; 2) Kawasan tersebut berada pada posisi wilayah pantai dan memiliki pulau-pulau kecil dan keanekaragaman jenis ikan yang bernilai jual tinggi; 3) Kecenderungan masyarakatnya yang berjiwa bahari tinggi dan berjiwa berwirausaha/ enterprenaur.

Kebijakan penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan yang telah berlangsung sejak tahun 2008 di Kabupaten Gorontalo Utara menimbulkan berbagai pertanyaan: apakah kebijakan penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo tepat sasaran; apakah infra struktur yang telah dibangun mendukung sebagai suatu kawasan minapolitan, bagaimana keberterimaan masyarakat nelayan ketika wilayahnya ditetapkan sebagai suatu kawasan minapolitan; apakah pemerintah daerah konsisten dalam mewujudkan target keberhasilan kebijakan lokasi pengembangan kawasan minapolitan; apakah iklim investasi terbuka bagi masyarakat nelayan; bagaimana keterlibatan pihak bank khususnya BRI sebagai bank pemerintah dalam memberi kredit bagi nelayan tanpa agunan; dan apakah pendapatan nelayan dan tingkat kesejahteraannya mengalami peningkatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Gorontalo Utara; dan 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Gorontalo Utara.

---

<sup>3</sup> Satria. Ekologi Politik Nelayan. 2009

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritik**

Menurut Abdullah (1988); dan Smith (1987) bahwa Implementasi kebijakan mutlak terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain. Ketiga unsur utama tersebut meliputi: “1) unsur pelaksana (*implementator*); 2) adanya program yang akan dilaksanakan, dan; 3) *target groups*”. Pada tingkat pemerintahan, pihak yang terutama berkewajiban melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi (Sharkansky, 1975). Selanjutnya Smith (*dalam*, Quade, 1977) menyebutnya dengan istilah “*implementing organization*”, maknanya adalah birokrasi pemerintah bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Implementasi menurut van Meter and van Horn (1975: 447) adalah: “*Implementation of the actions carried out both by the individuals/ officials or government groups or private that is directed at achieving the goals outlined in the policy decision*”. Selanjutnya dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa implementasi adalah: “*...is the execution of the basic policy decision, usually in the form of laws, but can also form the commands or decisions are an important executive or judicial decision*”. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Carl Friedrich (*dalam*, Wahab 2001:3) mengemukakan bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Menyikapi berbagai pengertian kebijakan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa kebijakan adalah tindakan pemerintah yang diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat berdasarkan usulan

baik secara individu, kelompok atau dari pemerintah sendiri, sehingga masalah yang diatasi atau diselesaikan tersebut mencapai tujuan. Oleh karena itu yang menjadi focus dari kebijakan itu adalah adanya tujuan dan objek atau sasaran dari kebijakan.

Implementasi kebijakan sebagai suatu system, maka kebijakan harus mengacu pada tujuan, yaitu dampaknya menimbulkan perubahan dan memenuhi harapan kelompok sasaran. Dampak tersebut menurut Grindle (1988) dipengaruhi oleh aktivitas implementasi yang meliputi dimensi-dimensi: 1) *Interests affected*; 2) *Type of benefits*; 3) *Extent of change envisioned*; 4) *Site decision making*; 5) *Program implementers*; 6) *Resources committed*; 7) *Power, interests, and strategies of actors involved*; 8) *Institution and regime characteristic*; 9) *Compliance and responsiveness*

Dari beberapa pandangan tentang implementasi kebijakan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan merupakan pilihan pemerintah sebagai bentuk tanggungjawabnya untuk memberdayakan masyarakat agar berdampak bagi kehidupannya baik secara individu, kelompok maupun pada masyarakat secara keseluruhan.

Minapolitan sebagai salah satu bentuk program pemerintah daerah dalam menunjang program pembangunan nasional dibidang perikanan untuk membangkitkan roda perekonomian, disamping mendorong aktivitas nelayan yang serba terbatas. Selain itu minapolitan sebagai bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan dibidang perikanan yang orientasinya mengurangi kemiskinan nelayan. Menurut Smith (1984: 14) program dibidang perikanan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan nelayan dalam hal: 1) perbaikan kapal-kapal dan alat perlengkapan; 2) subsidi masukan-masukan; 3) perbaikan pemasaran dan teknologi; 4) pembentukan koperasi atau organisasi lainnya, dan; 5) pengembangan sumber-sumber pendapatan alternative atau tambahan.” Lebih lanjut dikatakan bahwa empat alternative yang disebut pertama masing-masing diciptakan untuk mencapai satu atau lebih dari sasaran berikut ini: a) meningkatkan produktivitas nelayan (kuantitas penangkapan); b) meningkatkan harga-harga yang diterima pada nelayan; c) menekan biaya yang harus ditanggung para nelayan.

Menurut Mulyadi (2005: 28-29) tujuan pembangunan perikanan nasional adalah: (1) Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri; (2) Peningkatan perolehan devisa; (3) Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan; (4) Pemeliharaan kelestarian stok ikan daya dukung lingkungannya, dan; (5) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

Dalam membangun kawasan minapolitan sebagaimana yang dicita-citakan bagi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan membutuhkan enam persyaratan: *pertama*, komitmen daerah melalui renstra, alokasi APBD dan tata ruang yang seimbang; *kedua*, adanya komoditas unggulan seperti udang, patin, lele, tuna, dan rumput laut; *ketiga*, letak geografis yang strategis dan secara alami cocok untuk usaha perikanan; *keempat*, sistem mata rantai produksi hulu dan hilir seperti lahan budidaya dan pelabuhan perikanan; *kelima*, fasilitas pendukung, seperti keberadaan sarana dan prasarana seperti jalan, pengairan serta listrik; *keenam*, kelayakan lingkungan dengan kondisi yang baik dan tidak merusak.

Satria (2009: 107-108) berpandangan bahwa dalam pengelolaan potensi perikanan tangkap perlu diperhatikan beberapa dimensi yang menjadi “Ruh” dari suatu program yang diimplementasikan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: *Pertama*, dimensi ekonomi dirancang untuk membangun kekuatan ekonomi nelayan, baik dalam menghadapi pasar input maupun pasar output. Jaringan organisasi ekonomi nelayan sudah saatnya ditata untuk menghadapi ketidakadilan pasar, baik ditingkat lokal maupun supra-lokal. Penguatan jaringan tersebut juga dilengkapi dengan hal-hal teknis, khususnya perbaikan teknologi adaptif, modal kerja, manajemen usaha, jaringan pasar, dan kesempatan mengembangkan budidaya serta pengolahan sehingga mereka dapat menjadi aktor dan bukan lagi korban pertumbuhan dalam sistem bisnis perikanan terpadu. *Kedua*, dimensi ekologi diarahkan untuk memastikan akses nelayan terhadap sumber daya, serta menjadi tuan rumah yang dapat memastikan laut sebagai masa depannya. Artinya, dalam pengelolaan sumber daya (*resources governance*) telah kembali menemukan jati dirinya sebagai pengguna, pengelola, sekaligus penjaga laut. *Ketiga*, dimensi sosial-politik mensyaratkan nelayan memanfaatkan hak untuk berserikat, bersuara,



dan menyampaikan pendapat. Ini merupakan pintu bagi nelayan untuk keluar dari proses marginalisasi dalam sistem politik dan sistem sosial. Kehadiran serikat nelayan yang solid merupakan prasyaratnya. Sementara itu, dimensi sosial-budaya yang berorientasi pada menguatnya budaya bahari mesti mulai diperhatikan dengan sejumlah langkah gerakan cinta laut, gemar makan ikan, dan seterusnya.

Menurut Dunn (1994) dalam mengevaluasi suatu kebijakan perlu mengacu pada lima kriteria, yaitu: *effectiveness*, *efficiency*, *adequacy*, *equity*, *responsiveness*, dan *appropriateness*. *Effectiveness*: ketepatan program. *Efficiency*: hasil yang dicapai. *Adequacy*: kesesuaian antara rencana program dan hasil yang dicapai; *Equity*: kesempatan yang sama antara implementor kebijakan dan kelompok sasaran. *Responsiveness*: ketanggapan implementor kebijakan dan kelompok sasaran. Sedangkan *appropriateness*: harapan dan manfaat yang diperoleh implementor kebijakan dan kelompok sasaran.

Kaitannya dengan evaluasi tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara, maka kriteria yang digunakan mengacu pada konsep Dunn (1994) tentang kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

## **2.2 Penelitian yang relevan sebelumnya**

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan kaitannya dengan dengan implemetasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Edy (2004) dengan judul: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Perbankan Mikro, di Kabupaten Pekalongan provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo (Disertasi). Jusuf (2005) judul penelitian: Analisis Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Selatan Gorontalo (Disertasi). Kamuli (2011) dengan judul: Pengaruh Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari terhadap Produktivitas Nelayan Penangkap Ikan Tradisional di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya Kamuli (2011) Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan terhadap Produktivitas Nelayan Tradisional (Disertasi).

Analisis Dampak Impelementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara (2012).

Dari beberapa penelitian tersebut dapat dikemukakan hasil-hasil penelitian dalam matriks sebagai berikut:

Tahun	Judul	Hasil	Ket
Edy 2004	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Perbankan Mikro, di Kabupaten Pekalongan provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendapatan riil masyarakat pesisir di dua lokasi penelitian berada dibawah Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi (UMR/UMP);</li> <li>2) Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui perbankan mikro agar efektif implementasinya dengan menggunakan pendekatan analisis strategi generic, maka untuk kabupaten Pekalongan difokuskan pada sektor hilir, sedangkan untuk kabupaten Boalemo difokuskan disektor hulu.</li> </ol>	Disertasi
Yusuf 2005	Analisis Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Selatan Gorontalo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kebijakan pengembangan perikanan tangkap dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap <i>out-put</i> PDRB dan pendapatan wilayah secara absolut;</li> <li>2) kebijakan pengembangan perikanan tangkap dapat menjamin ketersediaan sumber daya ikan, yakni dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada pembentukan prioritas jenis kebutuhan, pengambilan keputusan, membangun kekuatan manajerial, membangun kekuatan produksi, membangun kekuatan pemasaran dan penilaian terhadap sosial-ekonomi masyarakat.</li> </ol>	Disertasi
Kamuli 2011	Pengaruh Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari terhadap Produktivitas Nelayan Penangkap Ikan Tradisional di Provinsi Gorontalo.	Upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan TMB diperlukan suatu pendekatan yang dapat diterima oleh kelompok sasaran, salah satunya adalah pendekatan dialogis, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan antara kepentingan pe-	Penelitian Fundamental

		merintah ( <i>top down</i> ) dengan kepentingan masyarakat ( <i>bottom up</i> ). Pendekatan itu perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu: 1) pengembangan suatu kawasan (lokasi, sarana, dan infra struktur); 2) pemberdayaan kelompok nelayan (keterampilan, modal tanpa agunan, diversifikasi usaha dan pemasaran); dan 3) tim akselerator yang handal (unsur lintas fungsi Pemda, tokoh masyarakat, para pakar, dan wakil nelayan).	
Kamuli 2012	Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan lokasi/kawasan minapolitan belum tertata dengan baik pada masing-masing titik yang telah ditentukan;</li> <li>2) Tidak ada "tanda" atau "identitas" yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara sebagai kawasan minapolitan;</li> <li>3) Kelompok kerja (POKJA) yang dibentuk berdasarkan SK Bupati tidak berjalan sebagaimana diharapkan, bahkan tidak terkoordinasi dengan baik;</li> <li>4) Masyarakat nelayan tidak memahami apa sebenarnya kawasan minapolitan dan manfaatnya bagi mereka ketika menjadi anggota nelayan minapolitan;</li> <li>5) belum ada jaminan asuransi bagi nelayan tradisional yang menjalankan aktivitasnya, baik terhadap keselamatan diri dan fasilitas/peralatan yang dimiliki.</li> </ol>	Penelitian Kerjama dengan BAHLIHRISTI

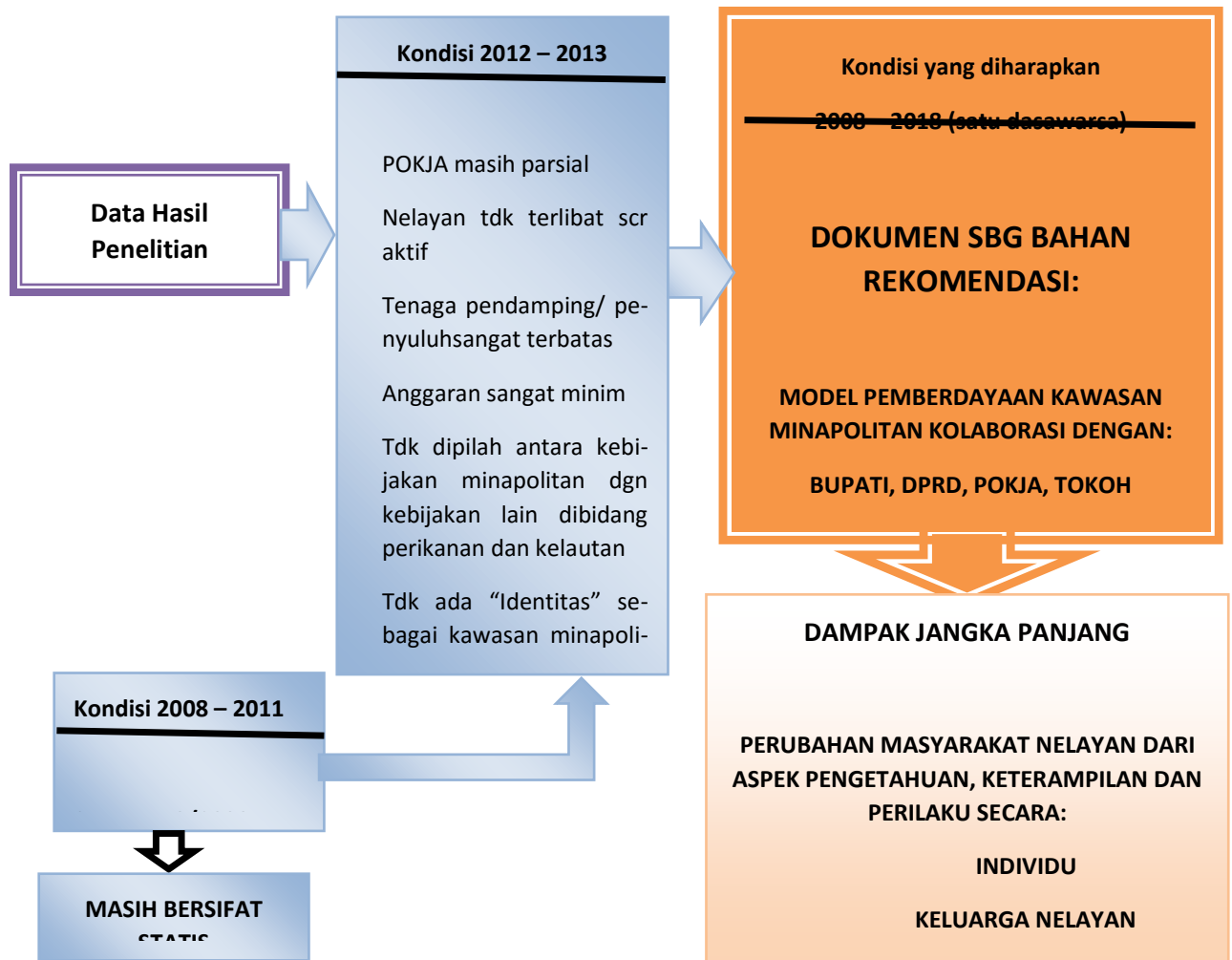
### 2.3 Roadmap Penelitian

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara hingga kini telah berlangsung  $\pm$  6 tahun sejak 2008 sesuai SK Bupati Gorontalo Utara No. 153. Untuk mensupport kebijakan tersebut Bupati Gorontalo Utara membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari: Asisten I, BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Koperasi, Dinas Kehutanan sesuai SK Bupati No. 154/2008. POKJA tersebut diharapkan dapat mengawal keberhasilan kebijakan penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Sejak diimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang tadinya berjumlah 3 kecamatan (Kwandang, Anggrek, Atinggola), saat ini (2011-2013) telah bertambah 2 kecamatan (Tolinggula dan Sumalata) sehingga secara keseluruhan lokasi pengembangan kawasan minapolitan menjadi 5 kecamatan.

Konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut berbagai sarana dan prasarana telah dibiayai untuk mendukung terbukanya akses ke lokasi-lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan minapolitan seharusnya memperoleh bantuan secara merata, baik modal usaha maupun peralatan (peralatan tangkap maupun budidaya) dan peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh para keluarga nelayan. Selain itu pendampingan sangat diperlukan bagi nelayan, karena kenyataannya para nelayan sangat terbatas dari aspek SDMnya. Target ke depan melalui implementasi kebijakan penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan Gorontalo Utara menjadi kawasan yang dikenal sebagai daerah lumbung ikan dengan berbagai jenis ikan dan budidaya yang berkualitas dan menjadi sumber pemasok produk-produk perikanan dan kelautan bagi daerah-daerah lainnya bahkan bisa menjadi pengeksor ke beberapa Negara seperti yang telah dilakukan oleh beberapa daerah lainnya yang telah berhasil sebagai kawasan minapolitan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka roadmap penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Roadmap Penelitian

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangsung sejak tahun 2008 s.d 2013. Analisis tersebut mengacu pada teori tentang evaluasi kebijakan yang menurut Dunn: 1994 dilihat dari dimensi: *effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness*. Aspek-aspek tersebut sebagai upaya untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan yang telah diimplementasikan.

Selanjutnya manfaat penelitian ini dari aspek teoritis adalah sebagai kontribusi bagi pengembangan bidang kebijakan public khususnya terkait dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan harus terus dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kekeliruan dalam formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Antara formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi merupakan satu kesatuan, sehingga dampak dari kebijakan memberi kontribusi bukan saja pada kelompok sasaran, tetapi juga untuk pemerintah sebagai penentu kebijakan dari berbagai aspeknya. Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi koreksi bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan berikutnya baik penyediaan SDM aparatur, sasaran kebijakan yang tepat, dan keberlangsungan kebijakan yang tetap memprioritaskan keseimbangan alam sebagai sumber kehidupan manusia.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Objek dan lokasi Penelitian**

Objek yang diteliti adalah implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dilihat dari aspek: *Effectiveness*: ketepatan program. *Efficiency*: hasil yang dicapai. *Adequacy*: kesesuaian antara rencana program dengan kondisi kawasan; *Equaty*: pemberian kesempatan kepada kelompok sasaran. *Responsiveness*: ketanggapan antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Sedangkan *appropriateness*: harapan dan manfaat yang diperoleh oleh pelaksana program dan kelompok sasaran. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya kawasan minapolitan pada masing-masing kecamatan dengan jarak tempuh:

1. Kota Gorontalo – Kecamatan Kwandang ± 67 km
2. Kota Gorontalo – Kecamatan Atinggola ± 98 km
3. Kota Gorontalo – Kecamatan Anggrek ± 83 km
4. Kota Gorontalo – Kecamatan Sumalata ± 105 km
5. Kota Gorontalo – Kecamatan Tolinggula ± 151 km

#### **4.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi: pendapatan nelayan, produktivitas hasil perikanan; investasi swasta, BUMN, dan usaha-usaha baru/ home industry. Data primer diperoleh dari: DPRD, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi, dan dinas terkait lainnya.

#### **4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (tahun ke 1), serta *Focus Group Discussion* (FGD) (tahun ke 2). Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh trend penelitian,

pengamatan langsung dan wawancara dilakukan pada implementor kebijakan dan lokasi/areal pengembangan kawasan minapolitan. Implementor kebijakan meliputi: staf Dinas Kelautan dan Perikanan, tenaga penyuluh/pendamping lapangan, dan nelayan anggota minapolitan untuk mendapatkan informasi yang rinci. Sedangkan FGD digunakan untuk mensinkronkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menghadirkan POKJA, penyuluh lapangan, tokoh-tokoh masyarakat, Komisi di DPRD Kab. Gorontalo Utara bidang kesra dan pembangunan, dan perwakilan kelompok nelayan minapolitan.

#### **4.4 Metode Analisis Data**

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan, yaitu: *Effectiveness: Efficiency: Adequacy: Equity: Responsiveness; dan appropriateness*. Data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi data.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Deskripsi Potensi Kawasan Minapolitan**

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki luas wilayah 1.580,58 km<sup>2</sup>, sebagian besar (75%) merupakan wilayah pesisir. Potensi yang dimiliki untuk pengembangan produk perikanan dan kelautan sangat besar. Gorontalo Utara sebagai salah satu daerah yang mengembangkan suatu kawasan yang disebut kawasan minapolitan sejak tahun 2008, selanjutnya tahun 2010 menyusul Kabupaten Bolaemo dan Pohuwato.

Awal perjalanan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan Gorontalo Utara masih dalam tahap penataan kawasan yaitu: Kwandang, Anggrek dan Sumalata. Tahap penataan tersebut berlangsung cukup lama, sehingga secara nyata action kawasan minapolitan dimulai tahun 2012. Berdasarkan data hasil penelitian (Kamuli, dkk 2012) Antara tahun 2008–2010 masih tahap persiapan pengembangan kawasan, seperti pelabuhan perikanan, perintisan jalan desa pantai, jembatan penghubung, pengidentifikasian nelayan dan jenis usaha serta peralatan yang dimiliki, dan pembentukan kelompok-kelompok nelayan. Mulai tahun 2011-2012 hingga penelitian ini dilakukan, action pengembangan kawasan minapolitan telah nampak perkembangannya. Dana stimulant yang diberikan mengacu pada hasil analisis kebutuhan yang diidentifikasi oleh Dinas Kelautan & Perikanan (DKP) Gorontalo Utara sekitar Rp. 1 Milyar. Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan fasilitas budidaya bukan dalam bentuk uang, dan disesuaikan dengan proposal yang diusulkan oleh masing-masing anggota kelompok nelayan minapolitan secara proporsional.

##### *5.1.1 Luas kawasan minapolitan*

Berdasarkan data, kawasan minapolitan di Gorontalo Utara memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya: rumput laut, air payau, air tawar, dan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan luas yang cukup besar. Potensi tersebut yang

dimanfaatkan masih sangat kecil. Berikut data potensi lahan budidaya dan pemanfaatannya.

**TABEL 1**  
**POTENSI BUDIDAYA DAN PEMANFAATANNYA**

NO	KECAMATAN (Kawasan Minapolitan)	POTENSI				PEMANFAATAN			
		RUMPUT LAUT (Ha)	AIR PAYAU (Ha)	AIR TAWAR (Ha)	KJA LAUT (Ha)	RUMPUT LAUT (Ha)	AIR PAYAU (Ha)	AIR TAWAR (Ha)	KJA LAUT (Ha)
1	ANGGREK	1,770	173	10	30	232	90.5	5	10
2	KWANDANG	1,575	383	15	95	130	239	5	15
3	SUMALATA	-	-	15	20	-	-	5	10
<b>JUMLAH</b>		<b>3,345</b>	<b>556</b>	<b>40</b>	<b>145</b>	<b>362</b>	<b>330</b>	<b>15</b>	<b>35</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Antara potensi dan pemanfaatan lahan masih sangat kecil, hal tersebut disebabkan oleh keterbasan anggaran pemerintah. Tetapi pemanfaatannya akan dimaksimalkan seiring dengan ketersediaan anggaran, baik APBN maupun APBD.

#### 5.1.2 Komoditas Unggulan (*Target dan Pemanfaatan*)

Selanjutnya komoditas unggulan dan produksi yang ditargetkan sejak tahun 2011 hingga 2014 cukup meningkat. Berikut data target produksi per komoditas unggulan.

**TABEL 2**  
**TARGET PRODUKSI PER KOMODITAS UNGGULAN**

No	Komoditas	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Udang Windu	80.00	98.72	234.00	250.00
2	Udang Vaname	1.20	1.48	100.00	100.00
3	Rumput Laut	32,588.00	39,105.00	41,110.00	43,830.00
4	Kerapu/Kuwe	4.66	5.76	6.00	8.00
5	Bandeng	1,000.00	1,293.10	5,340.00	6.90
6	Kakap	-	-	-	-
7	Nila	16.67	20.62	30.00	40.00
8	Patin	7.00	8.66	4.00	5.00
9	Mas	6.67	8.25	50.00	60.00
10	Gurame	-	-	-	-
11	Lele	8.33	10.30	10.00	15.00
12	Ikan Hias	-	-	-	-
13	Lainnya	6,672.00	8,251.26	10,204.34	12,619.70

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Selanjutnya realisasi dari target produksi per komoditas unggulan dapat dipaparkan pada table berikut:

**TABEL 3**  
**REALISASI PRODUKSI PER KOMODITAS TAHUN 2012 SAMPAI TRIWULAN III TAHUN 2013**

No	Komoditas	2012	2013				Rekapitulasi	Target Produksi 2013
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	Udang Windu	108.61	32.65	27.21	33.81	9.65	103.32	234.00
2	Udang Vaname					104.94	104.94	100.00
3	Rumput Laut	28,288.09	9,973.72	10,804.87	3,490.80	12,308.81	36,578.20	41,110.00
4	Kerapu							
5	Bandeng	394.82	711.03	488.83	512.72	662.82	2,375.40	5,340.00
6	Kakap							
7	Nila	10.20	9.50	9.16	13.24	14.27	46.17	30.00
8	Patin							4.00
9	Mas	4.64	6.13	6.41	4.06	6.00	22.60	50.00
10	Gurame							-
11	Lele	5.50	-	-	-	4.20	4.20	10.00
12	Ikan Hias							
13	Kuwe	54.90	4.18	2.23	1.28	5.02	12.71	6.00
14	Lobster	0.20	111.00	-	-	5.65	116.65	
14	Lainnya	-	-	-	-	6.03	6.03	10,204.34
Total		28,866.76	10,848.21	11,338.71	4,055.91	13,127.39	39,370.22	57,088.34

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Realisasi produksi perkomoditas sesuai paparan table di atas menunjukkan ada beberapa komoditas yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: 1) alam/ cuaca, 2) serangan hama, dan 3) perlakuan/ pemeliharaan tidak maksimal dilakukan (keterbatasan SDM nelayan).

Melalui kebijakan pengembangan kawasan minapolitan nelayan telah diarahkan dalam bentuk kelompok-kelompok sesuai dengan jenis kegiatan yang diminati. Data keragaan kelompok sesuai dengan jenis komoditas yang dipilih telah mencapai 62 kelompok. Setiap kelompok jumlah anggota bervariasi, antara 5 s.d 20 orang perkelompok. Jumlah anggota keseluruhan dari 62 kelompok berjumlah 589 orang. Data tentang keragaan kelompok terlampir.

Kelompok-kelompok yang telah dibentuk di kawasan minapolitan tersebar di beberapa kecamatan. Hingga tahun 2013 kawasan minapolitan telah berkembang seiring dengan pemekaran tiga kecamatan utama kawasan minapolitan, yaitu Kwandang, Anggrek, dan Sumalata. Hasil pemekaran kecamatan yang menjadi kawasan minapolitan telah bertambah menjadi 6 kecamatan, yaitu kecamatan: Anggrek, Monano, Kwandang, Ponelo Kepulauan, Sumlata, dan Sumalata Timur. Data mengenai kelompok di kawasan minapolitan hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut.

**TABEL 4**  
**DATA KELOMPOK DI KAWASAN MINAPOLITAN**

<b>No.</b>	<b>Kawasan</b>	<b>Jumlah Kelompok</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
1	Kecamatan Anggrek	32	329
2	Monano	3	32
3	Kwandang	19	192
4	Ponelo Kepulauan	24	228
5	Sumalata	5	45
6	Sumalata Timur	6	62
<b>Jumlah</b>		89	888

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Selanjutnya jenis kegiatan yang dikembangkan pada kawasan minapolitan meliputi: 1) Budidaya rumput laut; 2) Karamba Jaring Apung; 3) Sarana kebun bibit

rumpun laut; 4) Sarana pengembangan budidaya ikan lele; 5) Sarana budidaya air tawar; 6) Budidaya KJA Laut; 7) Budidaya air payau; 8) Budidaya ikan lele; 9) Budidaya ikan nilai; 10) Budidaya air tawar; dan 11) Budidaya karamba. Jenis kegiatan tersebut dibiayai dari anggaran: APBN, TP Budidaya, APBD II, dan PUMP-PB. Lebih jelas jenis kegiatan dan sumber pembiayaan dipaparkan dalam tabel berikut:

**TABEL 5**  
**JENIS KEGIATAN MINAPOLITAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

No	Jenis Kegiatan	Sumber Anggaran	Nilai (Rp)			
			2010	2011	2012	2013
1	Budidaya Rumpun Laut	APBD II		650,000,000.00		
		TP Budidaya			134,000,000.00	
		APBN				65,000,000.00
2	KJA	APBD II		165,000,000.00		
3	Kebun Bibit	APBD II		75,000,000.00		
4	Sarana Kebun Bibit Rumpun Laut	APBD II		75,000,000.00		
5	Sarana Pengembangan Budidaya Ikan Lele	APBD II		25,000,000.00		
6	Sarana Budidaya Air Tawar	APBD II	50,000,000.00			
7	Budidaya KJA Laut	PUMP-PB		400,000,000.00		
8	Budidaya ikan Lele	APBD II		50,000,000.00		
9	Budidaya Ikan Mas	APBD II		40,000,000.00		
10	Budidaya Ikan Nila	APBD II		25,000,000.00		
11	Budidaya Air Pavau	APBD II		30,000,000.00		
12	Budidaya Air Tawar	APBN		130,000,000.00		
13	Budidaya Laut	APBN			260,000,000.00	
14	Budidaya KJA Laut	APBN				65,000,000.00
15	Budidaya KJA Tawar	APBN				130,000,000.00
<b>Jumlah</b>			<b>50,000,000.00</b>	<b>1,665,000,000.00</b>	<b>394,000,000.00</b>	<b>260,000,000.00</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Untuk mensuport jenis jenis kegiatan nelayan minapolitan secara bertahap berbagai infrastruktur dibangun di daerah-daerah kawasan minapolitan. Berikut gambaran perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan minapolitan.

**TABEL 6**  
**PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**  
**DI KAWASAN MINAPOLITAN**

No.	Perkembangan Infrastruktur	Manfaat	Implikasi ke Masyarakat
1	Pembangunan Gedung Pengepakan Rumput Laut	Tempat Penampungan Rumput Laut	Tersedianya sarana penampung rumput laut
2	Pembangunan Kantor UPP	Sebagai wadah pelayanan pembudidaya	terkoodinirnya kelompok POKDAKAN
3	Pembangunan HSRT	Menambah ketersediaan benih	terpenuhinya supplay bibit
4	Pembangunan Jalan Setapak	Menghubungkan jalan ke lokasi budidaya	Mempercepat transportasi ke lokasi budidaya
	Pembangunan Jetty	Menghubungkan jalan ke lokasi budidaya	Mempercepat transportasi ke lokasi budidaya
5	Pembangunan Jalan Produksi	Menghubungkan jalan ke lokasi budidaya	Memperpendek rantai pemasaran
	Pembangunan Aula UPP	Sebagai wadah pelayanan pembudidaya	terkoodinirnya kelompok POKDAKAN
	Pembangunan Jalan Setapak di Desa Dunu	Menghubungkan jalan ke lokasi budidaya	Mempercepat transportasi ke lokasi budidaya
	Pembangunan Jalan Setapak di Pulau Dudepo	Menghubungkan jalan ke lokasi budidaya	Mempercepat transportasi ke lokasi budidaya
6	Pembangunan Tambatan Perahu	Menghubungkan jalan ke lokasi budidaya	Mempercepat transportasi ke lokasi budidaya

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut telah membawa perubahan kawasan dan membuka akses ke berbagai tempat pembudidayaan dengan mudah. Kemudahan itu terutama dalam hal mengangkut benih yang dibutuhkan nelayan di tempat-tempat pembudidayaan. Berikut data kebutuhan induk dan benih di kawasan minapolitan 2011 s.d 2014.

**TABEL 7**  
**KEBUTUHAN INDUK DAN BENIH DI KAWASAN MINAPOLITAN**  
**TAHUN 2011**

No	Kawasan	Benih/Bibit									
		Rumput laut (Ton)	Patin (Ekor)	Lele (Ekor)	Nila (Ekor)	Bandeng (Ekor)	Windu (Ekor)	Vaname (Ekor)	Mas (Ekor)	Kerapu (Ekor)	Kuwe (Ekor)
1	Sumalata	-	-	-	5,000	-	-	-	10,000	-	-
2	Anggrek	1,000	35,000	-	-	300,000	-	360,000	-	-	10,000
3	Kwandang	500	-	-	-	-	800,000	-	-	-	20,000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

**TABEL 8**  
**KEBUTUHAN INDUK DAN BENIH DI KAWASAN MINAPOLITAN**  
**TAHUN 2012**

No	Kawasan	Benih/Bibit									
		Rumput laut (Ton)	Patin (Ekor)	Lele (Ekor)	Nila (Ekor)	Bandeng (Ekor)	Windu (Ekor)	Vaname (Ekor)	Mas (Ekor)	Kerapu (Ekor)	Kuwe (Ekor)
1	Sumalata	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	20,000
2	Anggrek	1,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	-	10,000
3	Kwandang	1,000	-	10,000	-	500,000	300,000	200,000	-	-	10,000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

**TABEL 9**  
**KEBUTUHAN INDUK DAN BENIH DI KAWASAN MINAPOLITAN**  
**TAHUN 2013**

No	Kawasan	Benih/Bibit									
		Rumput laut (Ton)	Patin (Ekor)	Lele (Ekor)	Nila (Ekor)	Bandeng (Ekor)	Windu (Ekor)	Vaname (Ekor)	Mas (Ekor)	Kerapu (Ekor)	Kuwe (Ekor)
1	Sumalata	-	-	-	20,000	-	-	-	7,000	-	20,000
2	Monano										
3	Anggrek	2,500	-	-	-	300,000	100,000	100,000	-	-	-
4	Kepulauan	1,000	-	500	-	-	-	-	-	-	-
5	Kwandang	2,000	-	-	15,000	500,000	300,000	200,000	-	-	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

**TABEL 10**  
**KEBUTUHAN INDUK DAN BENIH DI KAWASAN MINAPOLITAN**  
**TAHUN 2014**

No	Kawasan	Benih/Bibit									
		Rumput laut (Ton)	Patin (Ekor)	Lele (Ekor)	Nila (Ekor)	Bandeng (Ekor)	Windu (Ekor)	Vaname (Ekor)	Mas (Ekor)	Kerapu (Ekor)	Kuwe (Ekor)
1	Sumalata	-	-	-	24,000	-	-	-	8,400	-	24,000
2	Anggrek	3,000	-	-	-	360,000	120,000	120,000	-	-	-
3	Kwandang	2,400	-	-	18,000	600,000	360,000	240,000	-	-	-
4	Monano	-	-	-	6,000	-	-	-	1,000	1,000	5,000
5	Ponelo Kepulauan	1,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500	10,000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, 2014

Memperhatikan tampilan data yang menggambarkan perkembangan implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Gorontalo Utara menunjukkan bahwa kemajuan yang sangat berarti. Kemajuan tersebut merupakan

gambaran perhatian pemerintah daerah Gorontalo Utara dalam pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional.

### **Perkembangan Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan**

Gorontalo Utara sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan minapolitan di antara 3 daerah yang di provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Gorontalo Utara merupakan awal mula dicanangkan sebagai kawasan minapolitan sejak September 2008 yang lalu. Perkembangan terus berlangsung, baik fisik seperti jalan, jembatan, akses telekomunikasi, jembatan tambatan perahu, fasilitas penyulingan air, fasilitas pertemuan atau aula nelayan, dan berbagai kemajuan lainnya telah nyata dirasakan oleh masyarakat di kawasan minapolitan. Dari isi nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan, berbagai fasilitas telah mereka peroleh dalam bantuan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo.

Kawasan minapolitan pada awalnya merupakan daerah yang terisolir dan sangat sulit dilalui, bahkan masyarakat nelayan hanya bisa melakukan perjalanan melalui laut sehingga cukup jauh untuk mencapai daerah yang dituju. Daerah yang dituju itu adalah daerah yang menjual keperluan yang berkaitan dengan keperluan hidup keseharian nelayan dan tempat penjualan peralatan yang berkaitan dengan pencaharian mereka sebagai nelayan. Berbagai kebutuhan sangat sulit diperoleh jika dibandingkan dengan sekarang. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh salah seorang ketua kelompok nelayan sekaligus sebagai tenaga penyuluh swadaya yaitu DA, bahwa:

Awal tahun 2008 saat Gorontalo Utara masih bergabung dengan Kabupaten Gorontalo (kabupaten Induk) kondisi daerah ini masih sangat terisolir, bahkan dalam pandangan kami tidak mungkin menjadi daerah maju seperti sekarang ini. Semuanya serba terbatas, listrik, fasilitas jalan, jembatan, akses komunikasi tidak tersedia. Tetapi secara perlahan keadaan itu berubah 360 derajat, berbagai fasilitas telah ada seperti sekarang ini. (2/3/2014)

Keberadaan kawasan minapolitan awalnya memang masih dilakukan kajian secara intensif, sebab berbagai hal harus dipersiapkan secara matang dan terus



berkoordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemda Gorontalo Utara yang tergabung dalam POKJA Minapolitan. POKJA diharapkan dapat bekerja secara sinergitas agar target pemerintah daerah menjadikan Gorontalo Utara sebagai kota ikan yang memiliki keunggulan dibidang perikanan dapat diwujudkan. Berbagai strategi dilakukan, antara lain: menyiapkan dan menata kawasan, mengidentifikasi kelompok-kelompok sasaran, kebutuhan yang diperlukan (peralatan dan fasilitas bagi nelayan), kesesuaian anggaran (pengadaan fasilitas pendukung suatu kawasan minapolitan: jembatan, jalan, jembatan tambatan perahu) dan lain-lain. Berbagai fasilitas tersebut tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran, tetapi direncanakan setiap tahunnya.

Berkaitan dengan uaian tersebut, Kepala Bidang Pembudidayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara, (NI) mengatakan bahwa:

Komitmen pemerintah daerah Gorontalo Utara untuk membangun kawasan minapolitan sesuai program prioritas memerlukan komitmen bersama seluruh SKPD, khususnya yang tergabung dalam POKJA minapolitan. Komitmen itu antara lain: setiap SKPD yang tergabung dalam POKJA minapolitan harus secara bersinergi menyusun anggaran masing-masing untuk mewujudkan kawasan minapolitan sesuai TUPOKSI. Sinergitas tersebut misalnya: Dinas Pekerjaan Umum merencanakan anggaran pembukaan jalan, jembatan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas lainnya. (6/3/2014).

Hal yang serupa dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum yang juga sebagai anggota POKJA (RA) yang menyatakan bahwa:

Dinas Pekerjaan Umum pada kenyatannya sejak kawasan minapolitan dicanangkan, maka secara otomatis seluruh anggota POKJA yang meliputi SKPD terkait telah menyusun rencana program serta aksi yang mutlak diwujudkan. Hal ini bisa terlihat dari terbukanya akses jalan dan jembatan menuju kawasan minapolitan yang ada di kawasan: Awandang, Anggrek dan Sumalata. Akses jalan dan jembatan pada ketiga kawasan tersebut telah terintegrasi, sehingga para nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan minapolitan mudah saling berinteraksi satu dengan lainnya. Interaksi itu seperti mudahnya mereka mencari berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kelengkapan penangkapan atau kebutuhan hidup nelayan, dan terbukanya akses para pedagang ikan sampai ke tempat transaksi pelelangan ikan yang telah dibangun oleh Dinas PU. (6/3/2014).

Tantangan yang nyata dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan adalah pada karakteristik para nelayan. Karakteristik dimaksud adalah perilaku para nelayan tersebut. Hal itu terjadi karena SDM nelayan sebagian besar tidak lulus SD. Dalam pandangan mereka apa yang diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan tidak perlu dipikirkan untuk dikembalikan, demikian juga berbagai fasilitas yang diberikan. Awalnya pemberian bantuan diberikan secara individual, tetapi hasil riset menunjukkan bahwa pemberian bantuan lebih banyak kegagalannya. Oleh karena itu pemberian bantuan tahap berikutnya dipersyaratkan harus diajukan oleh masyarakat nelayan dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan. Setiap kelompok mengajukan proposal sesuai kebutuhannya, lalu Dinas K & P memferikasi proposal yang diajukan tersebut.

Strategi pemberian bantuan dari model individual ke model kelompok dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua POKJA (MA) sebagai berikut:

Keterbatasan SDM nelayan merupakan kendala nyata yang dihadapi, sebab sebagian besar nelayan ketika diberikan bantuan fasilitas banyak mengalami masalah, khususnya perawatanterhadap peralatan tersebut. Ketika dievaluasi ternyata bantuan fasilitas banyak yang mengalami kerusakan, tidak terawat, bahkan ada yang dikatakan hilang atau dicuri orang. Oleh karena itu manajemennya dirubah dari individual ke model kelompok. Setiap kelompok menyampaikan apa nama kelompoknya dan apapula kegiatan yang akan dilakukan, juga diantara kelompok saling mengawasi satu sama lainnya. Ternyata strategi ini memberi manfaat seperti yang terjadi sekarang ini. Setiap kelompok mudah dikontrol dan control dapat dilakukan melalui kontak HP. (12/03/2014).

Terbukanya akses transportasi dan komunikasi memberi kemudahan bagi pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran. Kemudahan akses tersebut bagi pelaksana kebijakan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada kelompok sasaran dan permasalahan yang mereka hadapi untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Sementara dari sisi kelompok sasaran terjadi interaksi yang baik dengan pelaksana kebijakan dan interaksi yang baik di antara kelompok-kelompok sasaran. Interaksi di antara kelompok nelayan itu perlu dibangun, hal ini untuk menghindari terjadinya kelompok horizontal sesama kelompok nelayan atau nelayan pada umumnya. Persaingan lahan atau zona budidaya atau areal penangkapan sering

menjadi sumber konflik, tetapi kenyatannya pembentukan kelompok-kelompok nelayan dapat menghilangkan potensi konflik tersebut. Dalam kaitannya denganantisipasi kemungkinan terjadinya konflik antar sesama nelayan, menurut Kabid Pembudidayaan (NI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa:

Pelibatan anggota kelompok nelayan yang memiliki kompetensi dan kepribadian yang baik dan diterima di kalangan kelompok nelayan direkrut menjadi penyuluh swakelola. Artinya anggota kelompok nelayan yang memiliki kemampuan yang lebih diantara anggotanya diberi peran menjadi mitra dalam memberikan penyuluhan pada sesama anggota kelompok nelayan terkait dengan berbagai hal yang terkait dengan usaha perikanan dan budidaya. Tentunya pada awalnya diberi pengetahuan dan keterampilan melalui proses diklat-diklat, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Dinas K & P Kab. Gorut maupun diklat-diklat yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Juga diberi kesempatan untuk melakukan studi banding pada daerah-daerah yang telah maju dibidang penangkapan ikan dan budidaya, seperti di Bitung, Maluku dan Ternate. (20/03/2014)

Pemberian kesempatan tersebut pada kenyatannya memberi dampak positif baik pada dirinya secara individu, baik terhadap anggota kelompok yang ada di daerah-daerah pengembangan kawasan minapolitan. Dampak lainnya adalah diantara masyarakat nelayan yang belum tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan minapolitan, secara perlahan mereka merasa tertarik untuk masuk atau membentuk kelompok-kelompok nelayan baru. Sebab persyaratan yang diminta oleh Dinas K & P Kabupaten Gorontalo untuk bisa memperoleh bantuan fasilitas atau lainnya bagi nelayan harus mengajukan proposal dan jelas siapa-siapa anggota kelompok nelayan dimaksud. Kelengkapan kelompok juga adalah apa nama dari kelompok nelayan yang dibentuk tersebut dan bagaimana struktur organisasi kelompok nelayan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ketika diminta konfirmasi kepada salah satu ketua kelompok nelayan minapolitan yang sudah berhasil dalam melakukan aktivitas perikanan dan budidaya. Ketua kelompok nelayan (HZ) membenarkan pernyataan yang menyatakan bahwa anggota nelayan yang ada sudah harus membentuk kelompok-kelompok nelayan dulu. Lebih detail dikatakan bahwa:

Pengalaman selama ini, nelayan yang telah terbentuk kelompok dan jelas usaha yang akan dikembangkan, maka Dinas K & P Kab Gorontalo Utara mengecek atau memferikasi keberadaan kelompok nelayan dimaksud. Hasil verifikasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan memasukkan kelompok nelayan dimaksud dalam daftar kelompok nelayan untuk dipertimbangkan memperoleh bantuan atau fasilitas sesuai dengan proposal yang diajukan. Agar keabsahan kelompok nelayan dimaksud jelas, maka dilakukan wawancara dengan kelompok nelayan yang baru terbentuk untuk dimintai penjelasan lebih detail terkait apa yang menjadi tujuan dari pembentukan kelompok nelayan dimaksud. (25/03/2014)

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di kawasan yang telah ditetapkan sesuai SK Bupati No. 153/2008 tentang Pengembangan Kawasan Minapolitan, yaitu Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumlata telah mengalami perkembangan yang berarti atau sesuai harapan. Perkembangan tersebut dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

*Pertama*, aspek ketepatan sasaran (*effectiveness*) atau ketepatan program sudah sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu daerah sekitar 75% meliputi daerah pesisir dan pantai.

*Kedua*, aspek efisiensi. Artinya kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dari ketersediaan lahan atau kawasan telah memenuhi persyaratan secara wilayah dan kelompok sasaran atau nelayan yang diberdayakan. Di sisi lain bantuan yang diberikan baik dalam bentuk bantuan fasilitas maupun berbagai sarana dan prasarana sebagai kawasan minapolitan telah merubah pendapatan nelayan (nelayan tradisional) di atas Upah Minimal Provinsi (UMP) Provinsi Gorontalo tahun 2014 sekitar Rp. 1.325.000. Jika dibandingkan awal tahun 2008 saat pencanangan awal kebijakan pengembangan kawasan minapolitan, pendapatan nelayan saat itu hanya berkisar Rp. 350.000.

*Ketiga*, aspek *adequacy* atau kesesuaian antara program dan kondisi lapangan (objek dan subjek sasaran kebijakan) sangat relevan. Permasalahannya adalah bagaimana subjek atau kelompok sasaran dimaksud mampu meningkatkan kesejahteraannya sesuai rencana pemerintah daerah, disamping peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo Utara.

Keempat, aspek *equaty* bahwa program/kebijakan pengembangan kawasan minapolitan telah memberikan kesempatan kepada nelayan sebagai kelompok sasaran untuk menikmati program pemerintah wujud dari pemberdayaan nelayan dari tidak berdaya menjadi mandiri dan sejahtera. Dengan kata lain kebijakan tersebut telah mampu mengangkat derajat kehidupan dari masyarakat nelayan tradisional menjadi masyarakat nelayan yang tersentuh teknologi dibidang perikanan dan kelautan.

*Kelima*, aspek *responsiveness* atau munculnya rasa tanggungjawab di kalangan masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan untuk berusaha secara produktif dibidang penangkapan ikan dan budidaya. Rasa tanggungjawab itu diakui tidak secara keseluruhan dari kelompok-kelompok nelayan yang ada. Buktinya ada sebagian kecil kelompok nelayan yang mengalami masalah dalam aktivitas, baik perikanan tangkap dan budidaya tetapi permasalahannya tersebut masih teratasi dengan baik.

*Keenam*, aspek *appropriatness* yaitu kebijakan pengembangan kawasan minapolitan mampu memfasilitasi harapan masyarakat nelayan tradisional yang terisolir dan terbelakang dari masyarakat pada umumnya. Disamping itu juga manfaatnya dari kebijakan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat nelayan secara keseluruhan, seperti: terbukanya akses transportasi (jalan dan jembatan), komunikasi (jaringan handphone), transaksi perdagangan, akses pendidikan dan lain sebagainya.

### **Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan**

Sasaran dari setiap implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah terjadinya perubahan secara menyeluruh pada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Perubahan dimaksud adalah dari sisi *mind set* masyarakat dan perilaku hidupnya. Umumnya masyarakat nelayan masuk dalam kategori masyarakat yang memiliki SDM yang sangat rendah, apalagi nelayan yang masih sangat tradisional. Berbagai keterbatasan yang dimilikinya sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari,

karena dari aspek geografis jauh dari akses transportasi, komunikasi, kesehatan, hidup layak dan lain sebagainya.

Secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan atau program. Kebijakan dan program tersebut disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah sesuai dengan periode tertentu (5 tahunan atau 25 tahunan). Setiap rencana pembangunan itu fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara, Sekretaris Dinas K & P Kabupaten Gorontalo Utara (IS) mengatakan bahwa:

Permasalahan yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat nelayan melalui kebijakan atau program aksi adalah pada beberapa hal, yaitu: budaya kerja, disiplin waktu, sikap antisipatif, membangun jejaring kerja dan lainnya. Hal-hal ini perlu pendekatan yang sangat luar biasa, sebab bila salah pendekatan yang dilakukan kemungkinan besar program aksi akan sulit diwujudkan. Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan perubahan yang secara kasat nyata dapat kita lihat, seperti sikap keterbukaan dalam usaha, kemampuan untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan. Hal ini adalah gambaran dari adanya perubahan pada masyarakat nelayan itu sendiri. Misalnya perubahan dari tempat tinggal atau rumah-rumah mereka yang sudah semi permanen, permanen bahkan ada yang telah terpasang listrik dan parabola.

Aktivitas setelah terbukanya kawasan minapolitan nampak pada berkembangnya berbagai usaha seperti perikanan tangkap yang sudah maju. Hal itu karena sebelumnya nelayan hanya menggunakan perahu dayung atau perahu tanpa motor tempel. Kini kelihatan bahwa sebagian besar perahu nelayan menggunakan motor tempel, baik yang berukuran kecil (ketinting) atau ukuran menengah dan besar. Demikian juga dengan aktivitas budidaya, seperti: rumput laut, udang paname, bubara, bandeng, Karamba Jaring Apung (KJA), karapu dan lain-lain. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pemasaran hasil produksi yang belum memenuhi harapan, apalagi saat produksi melimpah. Permasalahan tersebut terungkap saat kegiatan FGD dilaksanakan di desa Iلودlunga Kecamatan Anggrek seperti yang diungkapkan salah seorang anggota nelayan (HZ):

Perbandingan nelayan saat ini dan saat lalu memang sangat berbeda, perkembangan sudah sangat maju. Fasilitas penangkapan ikan dan budidaya yang diberikan pemerintah sudah sangat memadai, tetapi terbentur pada pemasaran hasil produksi. Oleh karena itu ada beberapa harapan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti: harus ada campur tangan pemerintah. Campur tangan dimaksud misalnya adanya Koperasi yang bersedia membeli hasil tangkapan dan budidaya khususnya saat produksi melimpah. Selain itu Koperasi dapat memberikan modal usaha, sehingga nelayan tidak terbelenggu dengan para pedagang antara atau tengkulak. Di sisi lain ketika nelayan meminjam uang di Bank pemerintah seperti BRI, nelayan terbentur pada barang jaminan. Oleh karena itu perhatian pemerintah untuk itu sangat diharapkan untuk menjembati permasalahan dalam perolehan modal usaha. (18/04/2015).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Ilodulunga Kac. Anggrek (HA) yang memberikan beberapa masukan terkait dengan permasalahan nelayan di daerahnya, yaitu:

Pemerintah desa sangat mengapresiasi program yang diarahkan pada masyarakat nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, sehingga hidup yang layak yang diidamkan dapat terwujud. Saat ini permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya pasar yang permanen tempat menjual atau dapat menampung hasil produksi, sehingga secara langsung para nelayan dapat menikmati hasil tangkapan dan budidaya mereka. Koperasi sebagai alternative yang dapat menampung hasil produksi sampai saat ini belum ada. Koperasi dimaksud sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang ada di kawasan ini, agar lebih mudah pengelolaannya dan dapat mempekerjakan tenaga kerja local. Artinya SDM di daerah ini akan terberdayakan dengan baik, dan kesejahteraan nelayan menjadi lebih nyata.

Disamping berbagai permasalahan di atas, maka terdapat permasalahan yang segera diantisipasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan kawasan minapolitan yang mengedepankan lingkungan yang mendukung keberhasilan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan itu adalah lingkungan sekitar alam sekitar kawasan minapolitan telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Hutan mangrove telah terancam keberadaannya, setiap tahun semakin berkurang jumlahnya. Bahkan setelah ditebang hutan mangrove tersebut dibiarkan begitu saja, akibatnya daya dukung kawasan minapolitan terancam. Hutan di pegunungan sekitar kawasan minapolitan telah rusak dan bahkan kelihatan gundul.

Kawasan di sekitar budidaya di sepanjang pesisir airnya keruh saat musim penghujan, akibatnya berbagai jenis budidaya yang ada terancam mati atau produksinya tidak sesuai yang ditargetkan.

Pengaruh rusaknya lingkungan alam di kawasan minapolitan banyak dikeluhkan oleh para nelayan seperti dikemukakan salah seorang anggota nelayan (DS):

Rusaknya lingkungan alam di sekitar kawasan minapolitan menimbulkan dampak pada mendangkalnya pesisir pantai dan semakin meluasnya air yang keruh yang mengancam pengembangan budidaya. Dari waktu ke waktu kondisi ini semakin tak terkendalikan, oleh karena itu perlu perhatian pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan menggalakkan penanaman atau penghijauan kembali. Proses penanaman kembali itu harus melibatkan semua unsur termasuk kelompok-kelompok nelayan minapolitan, sehingga mereka merasa memiliki kawasan yang ada sebagai sumber kehidupannya. (24/06/2015).

Mencermati permasalahan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan menggambarkan bahwa dalam setiap kebijakan atau program yang dilakukan tidak terlepas dari realitas aksi di lapangan. Oleh karena itu pada awal sebelum kebijakan dirumuskan, maka terlebih dahulu harus diperhitungkan secara matang beberapa hal yang sangat terkait satu dengan lainnya. Hal-hal tersebut meliputi: tujuan yang hendak dicapai dari suatu program atau kebijakan, keakuratan anggaran, perhitungan waktu yang tepat, pelaksana kebijakan/ implementator kebijakan yang memiliki kapabilitas dan komitmen yang tinggi, kelompok sasaran, dan saling bersinerginya antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran serta mau melakukan *feed back* atas program atau kebijakan yang diimplementasikan.

## **5.2 Pembahasan**

### **Kriteria keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan**

Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gotontalo Utara di analisis dari enam kriteria keberhasilan suatu kebijakan. Kriteria tersebut dibahas secara detail sebagai berikut:



### *Effectiveness*

Gorontalo Utara secara geografis 75% merupakan wilayah pesisir. Potensi tersebut dicirikan oleh garis pantai sepanjang 320 km dan laut ZEE seluas 40.000 km. Sementara masyarakatnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan pesisir-laut sehingga menjadi potensi kekuatan social-budaya yang sangat signifikan. Potensi kawasan tersebut menjadi pertimbangan sehingga Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.

Target pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI 2010-2015 adalah peningkatan produksi minimal 5% (produksi perikanan tangkap dan budidaya). Peningkatan produksi minimal tersebut menuntut pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melakukan berbagai terobosan dalam memberdayakan masyarakat nelayan dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Pemanfaatan sumber daya yang ada tetap mengacu pada kemanfaatan jangka panjang dan kelestarian lingkungan.

Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya pada kenyataannya bisa dirasakan oleh kelompok nelayan minapolitan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Peningkatan produksi tersebut dikarenakan adanya intervensi pemerintah melalui implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang telah berlangsung sejak tahun 2008. Peningkatan produksi baik budidaya maupun perikanan tangkap telah berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan yang awalnya hanya berkisar Rp. 501.730/ bulan (2009), kini pendapatan itu telah meningkat secara signifikan mencapai Rp. 1.111.419 /bulan (2013).

Pendapatan nelayan tersebut masih dapat ditingkatkan seiring dengan upaya peningkatan produksi tangkapan dan budidaya yang dijalani oleh nelayan di kawasan minapolitan. Hal itu dapat dilakukan karena anggota nelayan memperoleh fasilitas sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Pemberian fasilitas berupa: perahu, alat pancing, perahu ketinting, tali tempat persemaian dan pembudidayaan

rumpun laut (Gris), fasilitas tempat penjemuran sederhana, dan pembukaan akses jalan menuju lokasi pengembangan kawasan minapolitan.

Fasilitas yang diberikan diharapkan dapat merubah cara atau teknik nelayan dalam memperlakukan/memelihara fasilitas dan perlakuan hasil produksi yang diperoleh. Oleh karena itu informasi yang disampaikan kepada nelayan harus transparan agar mereka memahami apa yang diperolehnya merupakan bentuk rangsangan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan menjadi lebih baik.

Nelayan patut dilibatkan secara emosi dan pikirannya agar mereka merasa ikut bertanggungjawab dan merasa memiliki terhadap setiap program yang digulirkan pemerintah. Dampaknya adalah menjadikan nelayan lebih mandiri dan berfikir antisipatif tanpa bergantung secara terus menerus pada bantuan pemerintah. Nelayan pada prinsipnya memiliki modal social yang sangat kuat seperti: jiwa saling membantu, gotong royong, semangat berusaha, gigih, dan pantang menyerah. Modal ini dalam perspektif Fukuyama (2003: 33) disebut sebagai *social capital* yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu. *Social capital* itu penting dipertahankan karena merupakan sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Selain itu agar tetap terjaga solidaritas diantara nelayan walau dalam aktivitas usahanya terjadi kompetisi baik dari aspek wilayah penangkapan maupun kapling usaha budidaya serta variasi hasil yang diperoleh. Solidaritas itu tetap dipupuk dan dikembangkan sebagai wujud hubungan social yang dapat menyadarkan mereka, bahwa mereka adalah satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Santosa, dkk (2012) bahwa hubungan social yang berorientasi kesadaran kolektif dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tetap mengedepankan terjalinnya hubungan social sebagai modal social perekat semangat kesatuan dan persatuan bangsa.

Kemanfaatan program yang ditujukan kepada masyarakat harus dilihat dari 2 aspek. *Pertama*, keuntungan dari masyarakat yang diberdayakan, dari bidang: ekonomi, social budaya, keserasian hubungan antara masyarakat, dan menghindari potensi konflik; dan *kedua* adalah aspek kelestarian lingkungan. Kelestarian

lingkungan sebagai sesuatu yang prinsip, sebab kualitas lingkungan khusus pesisir dan pantai sangat berpengaruh pada kuantitas pendapatan masyarakat nelayan. Data penelitian menunjukkan bahwa jangkauan tangkapan ikan seiring dengan perjalanan waktu dan kondisi lingkungan yang tidak lestari lagi, maka jangkauan semakin jauh ke tengah laut, bahkan sudah melampaui antar pulau. Demikian juga dampaknya pada budidaya yang dikembangkan sekitar pantai dan pesisir mengalami hal yang sama, hal ini terjadi karena air laut menjadi keruh karena air hujan yang langsung terbuang ke laut.

Oleh karena itu kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat harus tetap melibatkan dukungan atau partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dukungan atau partisipasi masyarakat harus terus diintervensi atau digerakkan oleh pemerintah, sebab pemerintahlah yang memiliki berbagai instrument untuk memaksa masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan. Selama ini pemerintah dalam melakukan kebijakan tidak melibatkan masyarakat secara aktif dan terkesan masyarakat sebatas menerima tanpa memberi sesuatu dari apa yang mereka peroleh. Dalam pandangan ini Grindle (1981) mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus memperoleh dukungan dari kelompok sasaran. Dukungan dimaksud bukan berarti masyarakat sebatas merespon atau menerima saja tetapi mereka harus diberi ruang memberi respons atas apa yang mereka peroleh. Mereka diberi stimulant dalam bentuk bantuan, tetapi mereka pula harus dituntut kewajiban apa yang mereka harus penuhi. Disinilah warga masyarakat harus dididik untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara.

### *Efficiency*

Pemberian bantuan fasilitas kepada kelompok-kelompok nelayan dimaksudkan agar kelompok-kelompok nelayan tersebut saling control dan saling memberi masukan antar sesama kelompok. Hal ini disadari karena beberapa waktu yang lalu pemberian bantuan fasilitas dilakukan secara individual, hasilnya mengalami kegagalan. Pembentukan kelompok-kelompok dilakukan secara cermat, yaitu dengan cara memvariasikan kemampuan masing-masing anggota kelompok

dari sisi kepemimpinan, manajerial dan kemampuan membangun semangat kelompok. Variasi dalam kelompok tersebut dilakukan secara bersama antara penyuluh lapangan (tim teknis) dengan masyarakat nelayan, sehingga kelompok-kelompok yang terbentuk merupakan hasil kesepakatan bersama dan memiliki komitmen bersama. Tindaklanjut terbentuknya kelompok-kelompok nelayan adalah dilaksanakannya Bimtek, dan Diklat untuk menguatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kemampuan membangun semangat kelompok dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Masalah yang sering mendera nelayan adalah saat pasca panen, produksi mengalami over produksi. Saat seperti ini biasanya nelayan panik, karena antara mempertahankan produksi sesuai harga jual yang diharapkan dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga harga jual mengikuti desakan kebutuhan tersebut. Disinilah kesempatan yang bisa dimainkan tengkulak, karena nelayan terdesak oleh kebutuhan yang segera dipenuhi khususnya kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan tengkulak dari sisi kemudahan memperoleh pinjaman tidak terlalu berbelit-belit, hanya didasarkan pada kepercayaan semata. Hal ini terjadi karena: (1) antara tengkulak dan nelayan telah terjalin ikatan emosional yang cukup lama, dan jika ada masalah diantara keduanya diselesaikan secara kekeluargaan; (2) persyaratan yang dipenuhi nelayan tidak terlalu administrative; 3) tidak perlu jaminan/agunan, cukup dengan perjanjian bila hasil tangkapan atau produksi diperoleh nelayan langsung disetor kepada tengkulak; 4) tidak terikat oleh waktu, kapan saja dan berapa uang yang dibutuhkan disesuaikan dengan perkiraan tengkulak dan kesanggupan nelayan. Eksistensi tengkulak menurut Satra (2009: 43), peran tengkulak tidak bisa dipandang secara negative, sebab pada kenyatannya peran tengkulak dapat menyelamatkan rumah tangga nelayan saat musim paceklik. Kelemahannya adalah harga yang dipatok tengkulak sangat rendah, bahkan tidak mampu menutupi biaya operasional yang telah dikeluarkan.

Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memikirkan jalan keluar mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah membentuk suatu wadah atau badan yang mampu menampung hasil produksi para nelayan, baik hasil tangkapan maupun budidaya sehingga kualitas dan harganya masih bisa bersaing

yang berada tidak jauh dari kawasan minapolitan. Sejak tahun 2012 telah dibentuk koperasi perikanan, yaitu Koperasi “Burung Laut” dan Keramat Delta Kalo”. Pada kenyataannya keberadaan koperasi tersebut belum mampu membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan seperti menampung atau membeli hasil produksi budidaya dan hasil tangkapan, khususnya dalam skala kecil. Peran Dinas Koperasi sebagai salah satu anggota POKJA dalam hal ini belum berperan dengan baik. Geliat koperasi perikanan masih jalan di tempat dan belum memperlihatkan keterlibatan serius terutama dalam mensupport usaha-usaha dibidang perikanan dan budidaya.

Selain itu keterlibatan pihak BUMN misalnya Bank pemerintah belum sepenuhnya melirik atau berpihak pada masyarakat nelayan dengan alasan tidak adanya jaminan sebagai agunan untuk memperoleh kucuran pinjaman atau kredit. Hal ini perlu dimediasi pemerintah daerah agar pihak bank khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberi ruang agar masyarakat nelayan dapat diberi kesempatan memperoleh kucuran kredit sesuai kelayakan usaha yang dijalaninya. Bila perlu pemerintah daerah menjamin kepada pihak bank dengan persyaratan tertentu dapat memberi kredit kepada nelayan khususnya nelayan-nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan minapolitan.

Bila mencermati permasalahan keterbatasan nelayan untuk memperoleh pinjaman dari pihak Bank lebih disebabkan oleh karena Bank tidak bisa melihat apa yang di masyarakat, seperti tanggungjawab mereka. Ketika masyarakat diberi bantuan, maka itu dianggap sebagai kewajiban pemerintah. Masyarakat tidak menyadari apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka juga. Akibatnya tidak muncul kreatifitas masyarakat, bahkan masyarakat cenderung ingin dibantu secara terus menerus. Harusnya pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan merubah mindset, jika suatu kebijakan yang diimplementasikan mampu merubah masyarakat “menjadikan daerahnya menjadi tuan rumahnya sendiri” maka kebijakan itu menjadi lebih efisien. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan anggaran sebagai konsekuensi dari suatu kebijakan, maka yang akan kembali adalah perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak terus dipikirkan diberi bantuan, tetapi masyarakat itu yang akan memberikan kontribusi ke

pemerintah dalam bentuk lain seperti “kepedulian terhadap lingkungannya”. Itulah gambaran pemikiran yang dikemukakan oleh Satria (2009: 107-108) dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat nelayan. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika pesisir dan pantai dijadikan sebagai bagian dari dunia atau rumah mereka, maka pasti kehidupan mereka pasti akan menjadi lebih baik.

### *Adequacy*

Keberadaan nelayan dari aspek SDM masih sangat terbatas, tetapi dari aspek ketahanan fisik dan mental sebagai manusia pesisir dan pantai telah teruji secara alami. Hanya saja tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka lemah dalam mengelola potensi sumberdaya ekonomi pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Modal ketahanan fisik dan mental tersebut akan mudah didorong dengan memboboti pikiran dan perilaku mereka menjadi manusia unggul dengan berbagai cara, antara lain melalui bimbingan dan pendampingan sehingga mereka terarah dan lebih produktif. Pikiran dan perilaku yang terarah dan produktif tersebut akan memberi kontribusi positif secara social ekonomi dalam mendorong tumbuhnya generasi nelayan yang maju dan mandiri. Kaitannya dengan hal tersebut Kusnadi (2009: 83) menilai bahwa keberadaan nelayan merupakan penyumbang terbesar nilai ekonomi secara nasional, oleh karena itu meningkatkan kualitas SDM nelayan harus terus dilakukan agar mereka terhindar dari jeratan kemiskinan.

Memang diakui bahwa permasalahan yang dihadapi nelayan sangat kompleks, menurut Satria (2009: 42) ada tiga hal yang sangat kompleks dihadapi nelayan, yaitu: teknologi, modal dan budaya. Ketiga hal tersebut selalu menjadi batu sandungan pemerintah dalam memberdayakan nelayan. Berapa banyak peralatan tangkap modern dengan teknologi yang memadai diberikan, modal usaha yang digulirkan dan berbagai upaya yang dilakukan untuk merubah budaya nelayan banyak mengalami kegagalan. Paham klasik yang dianut oleh sebagian nelayan yang sulit dihilangkan adalah selama laut masih biru dan air laut masih asin maka keberadaan ikan dan sumber daya di dalamnya tak akan ada habis-habisnya.

Oleh karena itu implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan merupakan moment yang paling baik untuk memberdayakan nelayan

yang sangat terbatas SDM. Keterbatasan SDM harus dilakukan secara bersinergi dan bersama-sama mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok nelayan dalam hal: *pertama*, pemenuhan kebutuhan akan peralatan yang digunakan sehingga pendapatannya meningkat; *kedua*, keluarga nelayan seperti isteri dan anak-anakserta saudara-saudaranya terdekat memperoleh manfaat, misalnya melakukan pengolahan sendiri hasil tangkapan atau hasil budidaya; dan *ketiga*, nelayan yang tergabung dalam kelompok minapolitan lebih digiatkan lagi sehingga kekuatan kelompok nelayan semakin baik. Kontrol terhadap kelompok-kelompok nelayan melalui ketua kelompok merupakan cara yang paling baik mendampingi nelayan secara terorganisir. Selanjutnya ketua-ketua kelompok akan mendampingi masing-masing anggotanya secara terus menerus, sehingga implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai target yang diharapkan.

Setiap kelompok nelayan harus pula diberi pemahaman bagaimana mengelola kelompok atau organisasi nelayan secara baik dan benar. Masing-masing harus bertanggungjawab "apa" dan bagaimana bentuk pertanggung-jawabannya, serta kepada siapa pertanggungjawabannya dituju. Sinergitas internal dan eksternal kelompok menjadi kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Masing-masing harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini penting untuk menghindari konflik antara kelompok yang ada, sebab persaingan di antara sesama anggota atau antar kelompok tidak bisa dihindari. Komunikasi antara dan antar kelompok perlu dibina secara berkelanjutan, agar rencana awal terbentuknya kelompok nelayan sesuai dengan arah kebijakan.

### ***Equaty***

Daerah pemukiman nelayan pada umumnya terkendala pada akses jalan dan jembatan. Akses jalan dan jembatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, tetapi perlu intervensi dari Dinas lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Terbukanya akses tersebut menjadikan daerah nelayan tidak terpencil atau sulit dijangkau, sehingga mereka mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha kelautan dan perikanan. Daerah pemukiman

nelayan saat ini telah terbuka, arus lalu lintas sangat lancar dan nelayan dapat keluar menuju pusat kecamatan atau kabupaten atau ke tempat-tempat yang menjual berbagai kebutuhan peralatan tangkap dan budidaya serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Kalau sebelumnya berbagai urusan harus melalui laut sehingga harus berputar jauh dan harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal dan waktu yang terbuang dalam perjalanan cukup lama. Keuntungan lain adalah anak-anak desa yang melanjutkan pendidikan ke SMP maupun ke SMA dapat dengan mudah mencapai sekolah-sekolah mereka.

Implikasi terbukanya akses transportasi telah memberi kemudahan dalam berbagai hal sebagai penopang aktivitas kehidupan nelayan patut diapresiasi. Betapa tidak tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dalam membuka daerah-daerah pesisir terpencil banyak memberi keuntungan. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Strategis KKP RI 2010 – 2014, yaitu mendorong berbagai instansi di tingkat Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) khususnya Dinas Pekerjaan Umum secara bersama mensupport terbukanya akses jalan di daerah-daerah pengembangan kawasan minapolitan.

Terbukanya akses jalan diharapkan juga membuka ruang terjadinya transaksi jual beli yaitu pasar. Target KKP RI melalui kebijakan pengembangan kawasan minapolitan adalah setiap kawasan akan dibangun satu pasar sebagai tempat transaksi hasil produksi, baik perikanan tangkap maupun hasil budidaya dan berbagai kebutuhan masyarakat nelayan lainnya. Tetapi karena terbatasnya anggaran, maka kehadiran pasar belum bisa diwujudkan.

Khusus pemasaran hasil budidaya rumput laut Dinas perdagangan dan perindustrian dan dinas Kelautan dan Perikanan memediasi antara nelayan minapolitan dengan BUMD dalam hal ini PT. Fitra Mandiri untuk membeli secara langsung hasil produksi pada kelompok-kelompok nelayan minapolitan. Hal ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan mendapat respon positif dari nelayan pembudidaya rumput laut. Kendalanya adalah jika produksi tidak mencapai satu ton, maka pihak perusahaan tidak bisa menjemput langsung dengan alasan biaya operasional. Kendala tersebut ternyata melahirkan pikiran inovatif dari beberapa ketua kelompok dan anggota minapolitan yang memiliki modal



kemudian membeli dan menampung produksi rumput laut tersebut. Produk yang terkendala pemasaran adalah hasil budidaya ikan seperti: ikan kuwe, bandeng, udang (windu dan faname) dan hasil budidaya ikan lainnya.

Kaitannya dengan strategi pemasaran hasil produksi nelayan minapolitan adalah pada masalah promosi. POKJA belum melakukan upaya promosi, padahal promosi produk dapat dilakukan melalui media online dengan biaya murah dan mudah diakses secara luas hingga ke manca Negara. Disamping itu POKJA belum juga melakukan sharing dalam bentuk seminar atau diskusi dalam level local, nasional, bahkan internasional sebagai ajang untuk mempromosikan Gorontalo Utara sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan. Melalui event itu banyak keuntungan yang diperoleh salah satunya dapat menghadirkan calon-calon investor baru yang mungkin dapat memperluas usaha dan ragam jenis budidaya nelayan minapolitan. Dampaknya dapat membuka usaha baru dan merangsang para nelayan pemula menekuni bidang perikanan dan kelautan.

### ***Responsiveness***

Keberhasilan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan tidak semata ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini implementor kebijakan di lapangan, tetapi kesungguhan dan tanggungjawab kelompok sasaran sangat menentukan. Antara implementor kebijakan dan kelompok sasaran harus tercipta *sense of belonging and sense of responsibility* yang kuat. Kecenderungan negative yang dihindari adalah kelompok sasaran yang menjadi subjek sekaligus objek kebijakan menganggap bahwa apa yang diberikan kepada mereka sebatas “pemberian” tanpa diikuti oleh tindakan yang bertanggungjawab. Demikian pula dukungan dari tokoh-tokoh kunci di masyarakat patut diperhitungkan, sebab mereka memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Selain itu orang-orang secara individu maupun kelompok yang telah berhasil dalam usaha yang dijalankan oleh pemerintah patut dijadikan tutor bagi anggota masyarakat lainnya, agar mereka merasa dihargai dan secara sukarela mau menularkan keberhasilannya kepada sebagian dari mereka yang belum berhasil. Oleh karena itu dalam perspektif Grindle (1980) keberhasilan suatu kebijakan akan

sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan pelaksanaan kebijakan itu di lapangan (*context of implementation*). Antara isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan menggambarkan sinergitas antara implementor kebijakan dengan kelompok sasaran, sebaliknya jika implementor kebijakan tidak bersungguh-sungguh melaksanakan isi kebijakan maka bisa diprediksi dampak yang diharapkan adanya perubahan pada kelompok sasaran akan mengalami kegagalan.

Merubah mindset nelayan menuntut kesabaran dan ketekunan implementor kebijakan termasuk pendekatan yang memungkinkan mereka dapat menerima perubahan yang berbeda dengan kebiasaan hidup mereka sebelumnya. Tantangan merubah mindset dalam hal pengenalan teknologi perikanan dan kelautan, modal dan budaya cukup memakan waktu yang lama. Sejak diimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan tahun 2008 yang lalu, kini mindset itu secara perlahan mulai berubah. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan sebagian besar kelompok-kelompok nelayan minapolitan dalam manajemen usaha, organisasi produksi, perlakuan terhadap peralatan tangkap dan budidaya, perubahan fisik rumah tempat tinggal dan lingkungan hidup mereka, serta kesadaran menyekolahkan ana-anak mereka. Juga tidak dapat dipungkiri sebagian dari mereka belum mampu merubah mindset sesuai harapan. Hal ini seperti apa yang dikemukakan Satria (2009: 42) bahwa merubah budaya nelayan / mindset kehidupan nelayan tidak semudah yang dibayangkan, perlu strategi dan pendekatan sehingga program yang ditujukan kepada mereka bisa berhasil.

### ***Appropriateness***

Manfaat lain yang diharapkan dari diimplementasikannya kebijakan pengembangan kawasan minapolitan adalah munculnya kegiatan ikutan yang tumbuh subur yang dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Kegiatan ikutan tersebut adalah kegiatan usaha yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok nelayan dengan memanfaatkan bahan baku dari usaha yang

dilakukan, misalnya adanya usaha-usaha kecil seperti sentra pembuatan kerupuk udang, kerupuk ikan, abon ikan, pembuatan roti khas rumput laut, dan lain-lain.

Salah satu usaha yang telah berkembang sebagai bentuk usaha ikutan dari implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan adalah pembuatan kerupuk udang, kerupuk ikan, pembuatan abon, dan pembuatan roti khas rumput laut. Kelompok usaha nelayan mengakui bahwa usaha yang dikembangkan telah berjalan dengan baik disebabkan oleh bahan baku yang dibutuhkan tidak terlalu sulit diperoleh, tetapi yang menjadi masalah pada pemasaran. Pemasaran selama ini hanya berkisar di daerah sekitar dan belum menjangkau ke daerah-daerah terjauh, karena promosi hasil produksi belum dilakukan, kemasan produk masih bersifat sederhana. Oleh karena itu perlu intervensi instansi terkait khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal kemasan, promosi produk dan pemasaran. Kemampuan nelayan dalam aktivitas usaha, baik perikanan tangkap maupun budidaya menunjukkan kemajuan, tetapi dalam hal manajemen pemasaran dan jangkauan akses sangat terbatas. Jika manajemen usaha dan jangkauan akses tersebut tercipta, maka target kebijakan minapolitan antara lain peningkatan pendapatan nelayan, ketertarikan investor dan pendapatan daerah juga akan meningkat.

Mencermati enam kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo setelah dianalisis, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan minapolitan. Dampak itu terlihat pada perubahan dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap para nelayan tersebut. Disamping itu mereka mampu melakukan sharing pengetahuan tentang berbagai hal yang mereka peroleh kepada nelayan-nelayan lain yang belum tergabung dalam kelompok nelayan minapolitan. Keuntungan terbentuknya kelompok nelayan minapolitan adalah mudah dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas usaha dan fasilitas yang diberikan.

Hal yang menarik hasil temuan lapangan adalah bahwa perlu keterlibatan POKJA secara kolaboratif dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan

minapolitan. POKJA tidak akan berhasil manakala hanya memposisikan pada job dinas masing-masing, tetapi secara bersama merumuskan strategi dan taktik yang dapat diperankan sehingga kawasan minapolitan bisa berkembang dan terukur dalam segala aspek. Aspek-aspek itu misalnya: kelestarian lingkungan, harmonisasi interaksi antara sesama nelayan anggota minapolitan dan nelayan yang belum anggota nelayan minapolitan untuk menghindari konflik horizontal, bimbingan dan pendampingan oleh POKJA secara berkelanjutan, dan pemberian reward and punishment. Reward diperlukan sebagai bentuk rangsangan kepada anggota nelayan yang berhasil, sementara punishment sebagai bentuk teguran halus bagi nelayan yang belum berhasil atau gagal.

### **Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan**

Kendala-kendala yang dihadapi, baik oleh pelaksana kebijakan maupun oleh kelompok-kelompok nelayan minapolitan sejak tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pelaksana kebijakan terkendala dalam hal terbatasnya tenaga penyuluh lapangan. Tenaga penyuluh lapangan sebagian besar adalah tenaga honorer, sehingga pendapatan tetap jika dibandingkan dengan penyuluh PNS sangat berbeda. Akibatnya kinerja tenaga penyuluh tidak sesuai harapan. Sementara dari sisi dari kelompok nelayan, sebagian kecil dari mereka masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah daerah. Ketergantungan itu membuat usaha mereka kurang berkembang sesuai target awal, tetapi sebagian besar dari mereka telah mengalami perubahan. Perubahan itu meliputi mind set dan perilaku, akibatnya pendapatan dan hasil produksi terus mengalami perkembangan yang sangat berarti.

*Kedua*, factor SDM. SDM dalam konteks ini dilihat dari pelaksana kebijakan itu sendiri dan SDM dari nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan minapolitan. Sesuai hasil observasi dari survey dari awal penelitian dilakukan hingga akhir kegiatan penelitian, pelaksana kebijakan yang lebih dekat dengan kelompok nelayan adalah tenaga penyuluh lapangan. Data menunjukkan bahwa tenaga penyuluh lapangan bidang perikanan dan budidaya sangat kurang.

Tenaga penyuluh yang berstatus PNS hanya berjumlah 3 orang, sementara lainnya sebagai tenaga honor. Tenaga honor terkendala pada pembayaran gaji, imbasnya adalah kinerja mereka tidak sesuai harapan. Idealnya tenaga honor harus dibuatkan kontrak kerja dan indicator pencapaian kerja agar bisa terukur hasil capaian atau kinerjanya sebagai penyuluh. Jika hal ini dilakukan, maka para penyuluh kontrak tersebut secara maksimal akan memenuhi kewajibannya, sebaliknya jika hal itu tidak tercapai maka langkah yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memberi *punishment* atau pemberhentian sebagai tenaga penyuluh.

*Ketiga*, factor alam. Alam sekitar kawasan minapolitan semakin hari semakin memprihatikan. Hutan sebagai penyangga kawasan telah mengalami kerusakan, seperti hutan mangrove dan hutan di pegunungan sekitar kawasan minapolitan. Akibatnya jika terjadi jutan, maka air di sekitar pantai mengalami kekeruhan yang sangat mengganggu produksi dan kualitas khususnya komoditas budidaya. Pemulihan kondisi lingkungan sekitar pantai dan pesisir di sekitar kawasan minapolitan perlu dilakukan dengan segera. Pemulihan ini tentunya bukan saja tanggungjawab Dinas Kehutanan atau Badan Lingkungan Hidup, tetapi intervensi Pemda secara sungguh-sungguh termasuk masyarakat sekitar kawasan minapolitan. Pemda dapat melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, Perguruan Tinggi dan Pihak swasta, pihak Bank dan lain sebagainya. Demikian juga melakukan penggalakan “Gerakan Siswa Menanam” khususnya bagi siswa SMK Perikanan untuk mewujudkan kawasan minapolitan yang asli dan tetap terjaga kelestariannya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten Gorontalo Utara pada kenyatannya telah membawa dampak yang signifikan bagi aktivitas usaha nelayan khususnya nelayan tradisional yang tergabung dalam nelayan minapolitan. Hal tersebut nampak dari hasil evaluasi terhadap kebijakan pengembangan kawasan minapolitan selama 2 (dua) tahun yang dikaji dari 6 (enam) aspek.

*Pertama*, aspek *effectiveness* atau kesesuaian program untuk masyarakat nelayan. Potensi panjang pantai ±320 KM dan juga sekitar 75% wilayah Gorontalo Utara merupakan daerah pesisir dan pantai, maka kebijakan pengembangan kawasan minapolitan sangat tepat diarahkan pada daerah ini. Potensi perikanan tangkap dan budidaya yang dimaksimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional telah membawa perubahan terhadap tingkat kehidupan ekonomi dan social budaya masyarakat setempat. Respons masyarakat ketika kebijakan atau program ini diimplementasikan sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 sangat responsive, buktinya perkembangan masing-masing kelompok nelayan minapolitan dengan berbagai dinamikanya telah menampakkan perubahan.

*Kedua*, aspek *effisience* atau hasil yang dicapai dari kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Hasil ini dilihat dari beberapa hal, yaitu: masyarakat nelayan yang sebelumnya belum mendapat bantuan fasilitas, pembobotan SDM, bagaimana memanfaatkan sumber daya laut dan lingkungan, dan terbentuknya kelompok-kelompok nelayan. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat yang tradisional dan belum memahami tentang sentuhan pembangunan. Disamping itu berbagai perkembangan sangat terlihat secara kasat mata, antara lain terbukanya akses jalan dan jembatan dan berbagai fasilitas lainnya.

*Ketiga*, aspek *adequacy* atau kesesuaian antara program dan kondisi kawasan atau masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pengembangan kawasan

minapolitan. Sebagai daerah yang sebagian besar daerah pesisir dan pantai atau sekitar 75% wilayah pesisir yang memiliki panjang pantai 320 KM sangat strategis dijadikan sebagai suatu kawasan minapolitan. Hanya saja mengotimalkan SDM dan SDA yang harus mempertimbangkan keseimbangan kedua hal tersebut. Bagaimanapun secara real SDM nelayan masih tetap menjadi perhatian untuk dikembangkan, baik dari aspek pengetahuan dan wawasan, serta aspek skill dalam pemanfaatan SDA untuk kelanjutan generasi nelayan pada masa mendatang.

*Keempat, aspek equity* atau pemberian kesempatan secara proporsional kepada masyarakat nelayan sehingga secara bersama menikmati dampak dari kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Artinya pada waktu-waktu sebelum kebijakan ini diimplementasikan, tidak dibentuk kelompok-kelompok nelayan. Pemberian fasilitas atau bentuknya lainnya dilakukan secara individual, akibatnya banyak mengalami kegagalan. Pembentukan kelompok-kelompok dimaksudkan agar diantara mereka terbentuk karakter maju bersama dan saling memberi dan menerima jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Misalnya pada saat-saat paceklik, maka diantara mereka diharapkan harus saling memberi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi.

*Kelima, aspek responsiveness* atau rasa tanggungjawab pada kelompok-kelompok nelayan minapolitan yang telah terbentuk. Memang diakui bahwa menanamkan rasa tanggungjawab pada masyarakat yang SDM rendah mengalami tantangan yang berarti. Tetapi jika secara intensif komunikasi yang dibangun dengan baik sesuai kondisi psikologis masyarakat nelayan setempat hasil sesuai harapan. Tantangannya adanya ada saja diantara sebagian kecil dari anggota kelompok nelayan yang tidak memahami hal tersebut. Bentuk rasa tanggungjawab yang bisa diamati dari kelompok-kelompok nelayan adalah ketika mereka diminta berkumpul atau mengikuti pertemuan untuk membicarakan atau mendiskusikan hal-hal teknis atau bimbingan teknis juga penyuluhan, maka mereka dengan sangat antusias mengikutinya.

*Keenam, aspek appropriateness* atau harapan dan manfaat yang diperoleh dari kebijakan pengembangan kawasan minapolitan. Antara pelaksana kebijakan

dan kelompok sasaran yang menjadi sasaran kebijakan sama memiliki harapan dan manfaat. Harapan dari pelaksana kebijakan adalah kebijakan pengembangan kawasan minapolitan dapat dicapai sesuai target demikian pula manfaatnya dapat memberi perubahan bagi kelompok sasaran. Sementara bagi kelompok sasaran, harapan mereka adalah sebelumnya mereka tidak memiliki apa-apa terkait dengan fasilitas yang memungkinkan mereka melakukan pencaharian dalam penangkapan ikan dan budidaya, maka kini mereka memperolehnya sesuai kondisi masing-masing serta kondisi alam. Disamping itu manfaat yang mereka peroleh adalah tingkat kesejahteraan mereka secara perlahan, antara lain pendapatan sudah meningkat, kondisi rumah dan fasilitas lain yang juga semakin dirasakan.

Oleh karena itu dari beberapa aspek yang focus kajian, maka komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan menjadi prioritas khususnya skill dan keterampilan dibidang kelautan dan perikanan. Sinergitas POKJA yang dibentuk untuk mensupport implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan diharapkan berperan sesuai dengan job masing-masing tetapi terintegrasi dengan target akhir dari kebijakan tersebut. Antara implementor kebijakan, kelompok sasaran, dan substansi isi kebijakan serta lingkungan kebijakan itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh.

## **6.2 Saran**

Oleh karena itu agar implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten Gorontalo Utara mencapai target yang telah ditetapkan, maka sebaiknya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. POKJA harus menyusun master plan pengembangan kawasan minapolitan sesuai keterlibatan dinas masing-masing secara terintegrasi, menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP), dan melakukan diskusi secara periodik membahas perkembangan kawasan minapolitan untuk menentukan kegiatan berikutnya;
2. Mempromosikan kawasan minapolitan secara luas melalui media online (website) atau melalui pameran-pameran berbagai produk perikanan dan



budidaya unggulan secara nasional bahkan internasional sehingga tersebar luas dan mudah diakses;

3. Memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok nelayan minapolitan yang berprestasi seperti studi banding ke beberapa daerah yang sukses mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah;
4. Merekrut tenaga penyuluh lapangan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam berkomunikasi dengan nelayan setempat;
5. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kepastian jaminan hidup dengan cara diikutkan dalam asuransi.
6. Perlu strategi dalam membangun kembali lingkungan, baik lingkungan darat sekitar pesisir seperti penanaman tanaman atau reboisasi di sekitar kawasan minapolitan. Gerakan penghijauan kawasan minapolitan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang menyediakan bibit dan aturan tentang kawasan “Hijau Kawasan Minapolitan” dan masyarakat sebagai penggiatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Dunn, William N., 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs.
- Edy, Hery. 2004. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Perbankan Mikro*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Disertasi.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jusuf, Nurdin. 2005. *Analisis Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Selatan Gorontalo*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana, IPB. Disertasi.
- Kamuli. Sukarman. 2011. *Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari pada Produktivitas Nelayan Tradisional*. Jurnal Ilmu Administrasi (JIANA) Volume 12, Nomor 1, Juli 2012. ISSN 1411-948X.
- \_\_\_\_\_. 2011 *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan terhadap Produktivitas Nelayan Tradisional*. Disertasi.
- Mazmanian, Daniel. A., dan Sabatier, Paul A. 1933. *Implementation and Public Policy*. London: Foresman and Company.
- Meter, Donald Van, & Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, dalam Adinistration and Society 6, 1975*: London: Sage.
- Mulyadi, S. 2005. *Ekonomi Kelautan*: Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Sharkansky, I. 1975. *Public Administration: Policy-Making in Goverment Agencies*. Third Edition. Chicago: College Publishing Company.
- Smith, Jay M., and Albert C. Hyde, eds., 1987. *Classic of Public Administration*. California: Brooks/Cole.
- Quade, E.S. 1975. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

**DAFTAR WAWANCARA  
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA  
2014**

**I. Dinas K & P Gorut:**

- a. Kepala Dinas/ Kepala Bidang Budidaya
- b. Tenaga Penyuluh

***a.1. Kadis K & P atau Kabid Budidaya***

1. Bagaimana perkembangan terakhir program pengembangan kawasan minapolitan di Kab. Gorut.
2. Apakah budidaya yang sekarang dikembangkan masih mengacu pada SK Bupati tahun 2008, yaitu komoditas unggulan rumput laut, udang, dan ikan bandeng)
3. Jika ada perubahan, apakah ada pertimbangan/ alasan perubahan dimaksud
4. Bagaimana penganggarannya: dana APBD dan APBN hingga 5 tahun terakhir (2009 s.d 2014). Sesuai data tahun 2012 (penelitian 2012) dana hanya 1 milyar.
5. Apakah ada perubahan penetapan (lokasi) pengembangan kawasan minapolitan (menyesuaikan dengan Master Plan Kab. Gorut)
6. Sarana dan prasarana apa saja yang telah dibangun di kawasan minapolitan.
7. Adakah home industry yang berkembang/ dibina untuk membangun jiwa wirausaha nelayan atau isteri/ keluarga nelayan
8. Bagaimana nelayan memperoleh bibit yang dibudidayakan: rumput laut, udang, dan ikan bandeng.
9. Apakah mereka dilatih dalam menjalankan aktivitas pembudidayaan (persemaian, pemeliharaan, dan pemetikan hasil)
10. Bagaimana pemasaran hasil produksi budidaya dimaksud (ke penampung, pedagang antara, melalui lembaga khusus atau koperasi atau pemda yang membeli langsung)
11. Bagaimana keterlibatan Bank misalnya BRI dalam memberikan kredit pada nelayan.
12. Apakah nelayan diikutsertakan dalam asuransi jiwa atau kesehatan.

**DAFTAR WAWANCARA**  
**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN**  
**KAWASAN MINAPOLITAN**  
**DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**2014**

*a.2 Tenaga Penyuluh*

1. Sudah berapa lama bapak/Ibu sebagai tenaga penyuluh
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu penyuluh tentang program kawasan minapolitan di kab. Gorut.
3. Apa setiap penyuluh dalam menjalankan tugas/kewajiban diberi target tertentu
4. Bagaimana keberterimaan nelayan atas kehadiran penyuluh di lapangan
5. Bagaimana strategi bapak/ibu sebagai penyuluh menghadapi karakteristik nelayan yang berbeda
6. Apa kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam memberikan Bimtek atau Diklat pada nelayan
7. Apakah materi Bimtek/ Diklat yang bapak/ibu penyuluh sampaikan dapat ditindaklanjuti oleh nelayan. Bila ya..bagaimana hasilnya.. Bila tidak solusi apa yang diberikan
8. Bagaimana koordinasi dengan Dinas K & Perikanan Kab. Gorut dalam pelaksanaan tugas sebagai penyuluh
9. Bagaimana bentuk laporannya. Jika ada dimintakan copian materi laporan (hard copy atau soft copy)
10. Pernahkah antar penyuluh diminta informasi tentang hasil pelaksanaan tugas sesuai pembagian wilayah masing-masing (Rapat koordinasi)
11. Pernahkah bapak/ibu penyuluh memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan program pemberdayaan nelayan, khususnya program pengembangan kawasan minapolitan.
12. Bagaimana tindak lanjut terhadap berbagai masukan yang bapak/ibu sampaikan.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA 2014**

#### **Anggota POKJA (2 atau lebih)**

1. Menurut bapak/ibu, apakah kebijakan dibidang perikanan dan kelautan di Kab. Gorut selama ini telah memberi manfaat bagi nelayan, khususnya nelayan tradisional.
2. Apakah bapak/ibu tahu bahwa bapak/ibu termasuk dalam POKJA Pengembangan kawasan minapolitan. Jika tahu...apa kontribusi yang telah diberikan.. Jika belum tahu (tunjukkan SK POKJA) apa yang mereka pikirkan setelah tau masuk dalam POKJA.
3. Apakah selama ini POKJA telah saling berkoordinasi satu dengan lainnya.. ataukah pernah membahasnya secara khusus dan membicarakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian.
4. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang telah dimulai sejak tahun 2008 yang lalu. Bila ya...apa yang bapak/ibu tau tentang hal itu... jika tidak atau belum tahu bagaimana pendapat bapak/ibu sebagai upaya mengembangkannya.
5. Bagaimana baiknya pengembangan kebijakan dibidang perikanan dan kelautan yang dapat meningkatkan PAD Kab. Gorut dan ICON Gorut sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pantai (75%) disbanding dengan daerah lain di provinsi Gorontalo.
6. Menurut bapak/ibu apa seharusnya yang perlu diperhatikan dari sisi nelayan selama ini. Apakah SDM nelayan, sarana dan prasarana, atau hal lain..

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA 2014**

#### **Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana menurut bapak/ibu kebijakan pemerintah daerah Kab. Gorut dibidang kelautan dan perikanan
2. Apakah bapak/ibu pernah mendengar program pengembangan kawasan minapolitan. Jika ya....bagaimana perkembangannya selama ini.. Jika tidak...seharusnya bagaimana pemerintah mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan agar dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan
3. Apakah bapak/ibu setuju Kab. Gorut dijadikan sebagai daerah percontohan pengembangan budidaya (rumput laut, udang, ikan bandeng) sehingga menjadi pusat “Kota Ikan” di provinsi Gorontalo. Jika setuju....apa alasannya.. jika tidak apapula alasannya...

## DAFTAR WAWANCARA

### EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA 2014

#### Nelayan

1. Apakah bapak/ibu telah merasakan peningkatan pendapatan setelah memperoleh perhatian/ bantuan pemerintah dalam usaha budidaya selama ini.
2. Apakah fasilitas yang diberikan atau dibangun pemerintah sudah sesuai kebutuhan bapak/ibu sebagai nelayan.
3. Apakah bapak/ibu tidak mengalami hambatan dalam memperoleh bibit untuk usaha budidaya.
4. Apakah bapak/ibu mengharapkan semua bibit untuk usaha budidaya diberikan pemerintah.... Atau sebegini dibeli sendiri.
5. Bagaimana keterlibatan tenaga penyuluh dalam membantu bapak/ibu dalam usaha budidaya.
6. Apakah bapak/ibu mengikuti diklat atau bimtek yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorut.
7. Dalam hal pemasaran hasil produksi, apakah bapak/ibu tidak mengalami masalah dalam pemasaran... Jika ada masalah...apa solusinya.
8. Apakah harga selama ini stabil atau mengalami pasang surut.
9. Jika terjadi over produksi, apakah PEMDA mengintervensi dalam hal pemasarannya. Jika tidak apakah disiapkan tempat penampungan khusus yang dapat menjamin kualitas produksi tetap terjamin.
10. Apakah bantuan yang diberikan telah memberi manfaat yang lebih. Misalnya dapat menambah peralatan budidaya, memperluas usaha, menambah bibit atau areal budidaya, dapat memperbaiki rumah, menyekolahkan anak atau membeli berbagai keperluan lainnya.
11. Untuk masa depan, apa harapan bapak/ ibu pada pemerintah pusat dan daerah terhadap usaha-usaha nelayan misalnya dari aspek: transportasi/ jalan, air bersih, pasar, dan lainnya.

**BIODATA TIM PENELITI  
KETUA PENELITI**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	196706062000031001
5.	NIDN	0006066707
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Paguyaman, 06 Juni 1967
7.	E-mail	<a href="mailto:sukarman_kamuli@ung.ac.id">sukarman_kamuli@ung.ac.id</a>
8.	Nomor Telepon/HP	0435824356 / 085240216450
9.	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6
10.	No Tlp/Fax	0435 821752
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 262 orang; S2 = - orang; S3 = - orang
12. Mata Kuliah yang Diampu		1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
		2. Ilmu Sosial Dasar
		3. Hukum Administrasi Negara
		4. Hukum Tata Negara
		5. Metodologi Penelitian Sosial
		6. Perspektif Global
		7. Sistem Pemerintahan Indonesia
		8. Otonomi Daerah
		9. Filsafat Ilmu
		10. Strategi Pembelajaran
		11. Perencanaan Pembelajaran
		12. Dasar-dasar Pendidikan Moral
		13. Pengenalan Komputer

**B. Riwayat Pendidikan**

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan	Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung	Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	Ilmu Sosial	Ilmu Administrasi
Tahun Masuk-Lulus	Masuk 1987, Lulus 1991	Masuk 2002, Lulus 2004	Masuk 2008, Lulus 2011
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pengaruh Pembinaan KAMTIBMAS terhadap Kesadaran Hukum (suatu	Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Motivasi Kerja Pegawai di	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengembangan



	penelitian di SMA Negeri 1 Gorontalo	Sekretariat Daerah Kota Gorontalo	Kawasan Minapolitan terhadap Produktivitas Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara Prov. Gorontalo
Nama Pembimbing	Drs. Ahmad Isa, (Alm) Johan Jasin, SH	Dr. Budiman Rusli, MS Drs. Darmawan, MS	Prof. Dr. H. Dedi Rosadi, MS Prof. Dr. H. Budiman Rusli, MS Prof. Dr. Hj. Erlis Karnesih, MS

### C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2010-2011	Pengaruh Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari (TMB) terhadap Produktivitas Nelayan Tradisional di Kabupaten Gorontalo Utara.	Hibah Fundamental Dikti	Rp. 17.500.000
3	2012	Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan RPJMN pada Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah Prov. Gorontalo (Anggota Peneliti)	Hibah BOPTN	Rp. 35.000.000
3	2012	Dampak Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo (Ketua)	Kerjasama BALIHRISTI Prov. Gtlo.	Swakelola: Rp. 26.000.000
4	2013	Kaji Ulang Program Agropolitan Jagung Provinsi Gorontalo (Anggota Peneliti)	Hibah Kompetensi	Rp. 100.000.000

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2011	Pemateri pada Workshop Kemahasiswaan:” Peranan ICT dalam Proses Pembelajaran” (Makalah)	-	-

2	2011	Peran Guru Bidang Studi PKn dalam Upaya Pemajuan HAM di Sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Gorontalo,	-	-
3	2012	"Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis IT", yang diselenggarakan oleh BEM FIP dan HMJ (Makalah)	-	-
4	2012	Nara Sumber pada kegiatan Uji Publik Usul Amandemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo.	-	-
5	2013	Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (Makalah)	-	-

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Kajian Kapasitas Pelaku dan Lembaga Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Gorontalo.	Volume 5/Nomor: 1/ 2008	INOVASI, ISSN 1693-9034
2.	Evaluasi Kemajuan Penerapan Penyelenggaraan <i>Good Governance</i> di Provinsi Gorontalo.	Volume 5/Nomor: 3/ 2008	INOVASI, ISSN 1693-9034
3.	Perencanaan Pegawai	Volume 6/Nomor: 3/ 2009	INOVASI, ISSN 1693-9034
4.	Otonomi Daerah dalam Memperkokoh Integritas Bangsa	Volume 7/Nomor: 4/ 2010	INOVASI, ISSN 1693-9034
5.	Filsafat Sistem	Volume 8/Nomor: 3/ 2011	INOVASI, ISSN 1693-9034
6.	Critical review Reformasi Paradigma Administrasi	Volume 8/Nomor: 4/2011	INOVASI, ISSN 1693-9034
7	Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari pada produktivitas nelayan tradisional	Volume 12/Nomor 1/2012	JIANA, ISSN 1411-948X
8	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara	Volume 30, No. 1 Tahun 2014 (Terakreditasi Dikti)	MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan

*Catatan: bisa dicek di Portal Garuda.*

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5 tahun terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
-	-	-	-

**G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Cakrawala Perubahan (TANTANGAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA PASCA REFORMASI)	2013		UNG Press

**H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

**J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.

Gorontalo, Agustus 2015  
Pengusul,

**Dr. Sukarman Kamuli, M.Si**  
**BIODATA TIM PENELITI**  
**ANGGOTA PENELITI**

**1. Identitas**

1	Nama Lengkap	Dr.Rauf A. Hatu, M.Si
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196312161991121001
5	NIDN	0016126307
6	Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Gorontalo
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 16 Desember 1963
7	Alamat Rumah	Jalan Raja Eyato III Kelurahan Molosifat <sup>w</sup> Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks/HP	08124437713
9	Alamat Kantor	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 821125/0435 821752
11	Alamat E-mail	<a href="mailto:rarizak@gmail.com">rarizak@gmail.com</a> & <a href="mailto:rauf.hatu@ung.ac.id">rauf.hatu@ung.ac.id</a>

**2. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Manado	UNAIR SBY	UNIBRAW MALANG
Bidang Ilmu/Program Studi	Antropologi	Ilmu-Ilmu Sosial	Sosiologi Pedesaan
Tahun Masuk-Lulus	1982-1987	1997-2000	2007-2010
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Pendidikan Non Formal Terhadap Penerapan Teknologi Pertanian di Kelurahan Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	Perubahan Budaya Huyula Bagi Masyarakat Desa Buhu Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo	Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu dan Dampaknya Terhadap Perubahan Masyarakat (Studi Kasus Perubahan Sosial Petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo)
Nama Pembimbing/Promotor	1. Prof. Drs. A. Nanlohy 2. Drs.A.E.Awuy	Prof. Dr. Laurentius Dyson, MA	1. Prof.Dr.Ir.Sugiyanto,MS 2. Prof.Dr.Ir.Keppi Sukei.,MS 3. Prof.Dr.Ir Sanggar Kanto,MS

### 3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2008	Integrasi Sosial Masyarakat Yang Berbeda Etnis (Studi Kasus di Kecamatan Atingola Kabupaten Gorontalo Utara)	Biaya sendiri	
2	2009	Pengaruh Mutu Sumber Daya Manusia Terhadap Partisipasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Gorontalo	Biaya TPSDM	
3	2010	Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perkebunan Tebu dan Dampaknya Terhadap Perubahan Masyarakat (Studi Kasus Perubahan Sosial Petani di Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo) (Penelitian Disertasi)	Biaya Sendiri	
4	2011	Konsep Pemukiman Masyarakat Pertambangan Rakyat Motomboto Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lingkungan (Suatu Penelitian di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.	Balihristi Provinsi Gorontalo	

### 4. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Kedudukan	Waktu dan Tempat
1	Seminar dan Lokakarya dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Departemen Sosial RI	Hasil Studi Kelayakan Persiapan Lokasi (KAT) di Provinsi Gorontalo	Pemateri	5 s/d 9 Okt. 2009 Hotel "Mercure" Batam
2	Sosialisasi Program LK3 "Mootilango" Provinsi Gorontalo	Eksistensi Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pemateri	12 Okt. 2009 di Kab. Pohuwato
3	Pertemuan Pimpinan LSM dan Ormas se-Provinsi Gorontalo oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov.Gorontalo	Miras dan Judi Dalam Sudut Pandang Sosiologis	Pemateri	15 Nopember 2009 di Aula Kantor Kesbangpol Prov.Gtlo
4	Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Dinas Sosial Provisni Gorontalo	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemateri	21 Sept. 2010 Hotel "Mega Zanur" Gorontalo

5	Focus Group Discussion oleh Badan Statistik Provinsi Gorontalo	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Gorontalo	Pemateri	29 Sep. 2010 di Htl Quality Gtlo
6	Latihan Dasar Kepemimpinan oleh LSM Peduli Rakyat Provinsi Gorontalo.	Peran Pemuda dalam Pembangunan	Pemateri	23-25 Des. 2010 di Kab. Gorontalo
7	Seminar Lingkungan Tingkat Prov. Gtlo Memperingati Hari Air Sedunia Tahun 2011 “Tema Mendidik Generasi Yang Peduli, Cinta dan Berbudaya Lingkungan” oleh Green Community SMA Negeri 1 Limboto	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Budaya Lokal	Pemateri	21 Maret 2011 di SMA Negeri 1 Limboto Kabupaten Gorontalo
8	Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Limboto	HMI: Problematika Dalam Transisi Demokrasi (Sudut Pandang Sosiologis)	Pemateri	3 April 2011 Limboto Kab. Gorontalo
9	Forum Koordinasi Pengelolaan & Pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	Pemanfaatan Potensi teluk Tomini Berbasis Wilayah WPP	Pemateri	12 Mei 2011 di Hotel Quality Gorontalo
10	Rakor Pengendalian Kerusakan Sungai dan dan Danau oleh Balihristi Provinsi Gorontalo	Menunju Penyelamatan Danau Limboto	Pemateri	15 Agustus 2011 di Gorontalo
11	Seminar Nasional dilaksanakan Balihristi Provinsi Gorontalo	Kemiskinan dan Penanggulangannya (Suatu Kajian Sosiologis)	Pemateri	26 Juli 2011 Gorontalo
12	Dialog Kebudayaan Nasional Dalam rangka Persiapan Kongres Kebudayaan tahun 2013	Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Gorontalo	Pemateri	25 November 2011, di Makasar
13	Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Paguyaman	Prilaku Masyarakat di Sekitar Daerah Aliran Sungai	Pemateri	16 Des. 2011 di Limboto Kab.Gtlo
14	Pelatihan Amdal Kerjasama Balihristi Prov.Gtlo dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan (PSL&K) Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Negeri Gorontalo LP2M UNHAS Makasar	Aspek Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemateri	29 Mei 2012 di Aula Dharma Wanita Univ. Negeri Gorontalo
15	Forum Collocium “Tentang Peran Ilmu-Ilmu Sosial”	Menggagas Ilmu Sosial Transformatif	Pemateri	13 April 2012.

	yang dilaksanakan Pusat Studi Ilmu Sosial (Pusos) FIS Universitas Negeri Gorontalo			Fakultas Ilmu Sosial Univ. Neg.Gtlo
16	Kegiatan Prakondisi Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan tertinggal yang di laksanakan LP3 UNG	Kemampuan Beradaptasi dalam konteks Sosiologi- antropologi dan Kemampuan Komunikasi Sosial	Pemateri	29 September 2012 di Gedung LPMP Gorontalo

#### 5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan	Volume 5. Nomor 4 Desember 2008	Inovasi
2	Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik dalam dinamika Kehidupan Masyarakat	Volume 6 Nomor 2 Juni 2009	Inovasi
3	Bergabunglah dengan Rakyat (Sebuah Renungan Bagi Wajib Pilih)	Hal. 19 Tanggal 23 Januari 2009	Koran Gorontalo Post
4	Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial (Suatu Kajian Teoritis)	Volume.7. No. 4.Tahun 2010	Inovasi
5	Land Conversion and Its Impact On Socio-Economic Life Of Society (A Case Study In Tolangohula Subdistrict Gorontalo).	Volume 9, Nomor 1 Januari 2011	Jurnal Jaringan Aplikasi Manajemen (JAM)
6	Konsep Pemukiman Masyarakat Pertambangan Rakyat Motomboto Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lingkungan	Volume VI Nomor 2 Agustus 2011	Inovasi Gorontalo

#### 6. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir.

No.	Nama Pengabdian	Judul Pengabdian	Kedudukan	Waktu dan Tempat
1	Studi Kelayakan (Bimbingan Motivasi Askesos) di Provinsi Gorontalo dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	-	Nara Sumber	8-10 Sep. 2009 di Kab.Phuwato dan Gorut
2	Work Shop Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) diselenggarakan Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI	-	Peserta	14 s/d 18 Desember 2009 di Puncak Bogor
3	Pengkajian/Bedah Proses dan Hasil Ujian Akhir Nasional di	-	Wakil Ketua	01 Juni 2010 di Gorontalo

	Provinsi Gorontalo oleh Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia (TPSDM) Prov. Gtlo			
	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo	-	Wakil Ketua	02 Juli 2010 di Gorontalo
4	Penilaian Kinerja SKPD dan Pegawai di lingkungan Pemda Boalemo	-	Tim Penilai	27 Sep.2010 di Tilamuta Boalemo
5	Musyawahar Besar III LSM “ Peduli Rakyat” Provinsi Gtlo	-	Penasehat	9 Nopember 2010 di Gorontalo
6	Penilaian Kerangka Acuan Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh PT Sawindo Cemerlang tentang akses jalan di Kec.Popayato Kab. Pohuwato	-	Tim Ahli Sosial Budaya	24 Pebruari 2012 di Hotel Andalus Gorontalo
7	Penilaian Kerangka Acuan Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh PT Inti Global di Kec. Popayato Kab. Pohuwato	-	Tim Ahli Sosial Budaya	12 Maret 2012 di Kabupaten Pohuwato
8	Kajian Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Kota Gorontalo”Pusat Studi Ilmu Sosial” (Pusos) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Neg.Gtlo	-	Tim Perumus	28 Mei 2012 Gedung Aldista Gorontalo.
9	Penilaian dokumen ANDAL,RKL dan RPL Pembangunan PLTU Molutabu di Desa Molutabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	10 September 2012 Hotel Magna Kota Gorontalo
10	Penilaian dokumen Revisi Andal,RKL dan RPL perkebunan tebu dan pabrik pengolahan gula dilaksanakan oleh PT Tolanghula Gorontalo	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	30 Oktober 2012 Hotel New Rahmat Kota Gtlo
11	Penilaian Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Boalemo	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	14 Nopember 2012 di Hotel Queen Guet Gorontalo
12	Penilaian Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pohuwato, oleh PT. Bintang Tirta Pratama	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	29 Oktober 2012 di Htl Andalus Kota Gorontalo



13	Penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Gorontalo Utara oleh PT.Umeke Makmur	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	5 Desember 2012 di Hotel Eljie Gorontalo
14	Penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) pembangunan Kelapa Sawit di Kab. Gorontalo oleh PT.Heksa Jaya Abadi	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	6 Desember 2012 di Hotel Eljie Gorontalo
15	Perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL pengelolaan Kelapa Sawit di Wonosari, Dulupi Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh PT.Argo Astra Surya	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	18 Desember 2012 di Kantor Balihrisi Provinsi Gorontalo
16	Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL dan (Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pembangunan Pangkalan Ikan (PPI) Inengo Kabupaten Bone Bolango oleh PT.Bintang Tirta Pratama.	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	11 Januari 2013 di Restoran Exotic Bone Bolango.
17	Seminar Nasional yang dilaksanakan Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Gorontalo, dengan Tema Restorasi Bangsa Merupakan Wujud Dari Pergerakan Patriotik 23 Januari 1942.	-	Pembanding	3 Pebruari 2013 di Kota Gorontalo
18	Penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Swadaya Gemilang Indonesia Jaya di Kabupaten Boalemo	Dokumen Sosial Budaya	Tim Ahli	13 Maret 2013 di Kab. Boalemo
19	Debat Kandidat Calon Wakil Walikota Gorontalo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013-2018	sesuai surat Ketua KPU Kota Gtlo No.122/KPU-KOTA-028.71/III/2013 tanggal 16 Maret 2013	Panelis	18 Maret 2013 di Gedung Aldista Kota Gtlo

#### 7. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-	-	-	-

**8. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

**9. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	-	-	-	-

**10. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lencana 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia	2008

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing.

Gorontalo, Agustus 2015  
Pengusul,

Dr. Rauf A. Hatu, M.Si  
NIP. 196312161991121001

**BIODATA TIM PENELITI  
ANGGOTA PENELITI**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap	Drs. Rusli Isa, M.Si
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	19660706
5.	NIDN	0006076604
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 6 Juli 1966
7.	E-mail	ulie_007@yahoo.co.id
8.	Nomor Telepon/HP	081340097196 / 085340352515
9.	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6
10.	No Tlp/Fax	0435 821752
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	D3 = 69 Orang S-1 = 187 orang;
12. Mata Kuliah yang Diampu		1. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen
		2. Manajemen Sumber Daya Manusia
		3. Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan
		4. Teori Organisasi dan Pengambilan Keputusan
		5. Filsafat Ilmu
		6. Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi 1
		7. Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi 2
		8. Korespondensi Indonesia
		9. Pengantar Administrasi Publik
		10. Komunikasi Bisnis

**B. Riwayat Pendidikan**

	<b>S-1</b>	<b>S-2</b>	<b>S-3</b>
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan	Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung	-
Bidang Ilmu	Pendidikan Administrasi Perkantoran	Ilmu Administrasi	-
Tahun Masuk-Lulus	Masuk 1986, Lulus 1991	Masuk 2007, Lulus 2009	-
Judul Skripsi/ Thesis	Motivasi Manajer dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha Koperasi Pada KUD Perko Baru Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo	-

Nama Pembimbing	Drs. Junus A. Musa, (Alm) Drs. Nurdin Dama, MS.	Prof. Dr. H. Asep Kartiwa, Drs., SH., MS. Dr. H. Entang Adhy Muhtar, Drs. MS.	-
-----------------	--	--	---

### C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2010	Pengembangan Karir Pegawai (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Gorontalo)	PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG	Rp. 5.000.000,-
2	2011	Pengelolaan Data Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo	Dana Hibah IM-HERE	Rp.30.000.000,-
3	2012	Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Penanaman Modal Kota Gorontalo	PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG	Rp. 5.000.000,-
4	2013	Harmonisasi Jaringan Sosial Sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat Pelanan Publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Hibah BOPTN	Rp.35.000.000,-
5	2013	Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Paguyaman Kabupaten Boalemo	PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG	Rp. 5.000.000,-
6	2014	Kompetensi, Kompensasi, Dan Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG	Rp. 5.000.000,-

### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2010	Penguji Kompetensi Siswa Peserta Ujian Nasional Yang diselenggarakan Oleh SMK N 1 Kota Gorontalo	-	-
2	2011	Penguji Kompetensi Siswa Peserta Ujian Nasional Yang diselenggarakan Oleh SMK N 1 Kota Gorontalo	-	-
3	2012	Penguji Kompetensi Siswa Peserta Ujian Nasional Yang	-	-

		diselenggarakan Oleh SMK N 1 Kota Gorontalo		
4	2014	Pengolahan dan Pengemasan Komoditas Ikan Teri di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	Rp.25.000.000,-

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Administrasi Publik Masa Kini dan Tantangan Masa Depan	Volume 6/Nomor: 1/ 2009	INOVASI, ISSN 1693-9034
2.	Efektivitas Organisasi Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Setelah Menjadi Perangkat Daerah	Volume 6/Nomor: 4/ 2009	INOVASI, ISSN 1693-9034
3.	Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kependudukan Di Kabupaten Gorontalo	Volume 05/Nomor: 02/ 2014	PEDAGOGIKA , ISSN 2086-4469

#### F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5 tahun terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu & Tempat
-	-	-	-

#### G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Kependudukan	2014	110	Ideas Publishing

#### H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

**J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing.

Gorontalo, Agustus 2015  
Pengusul,

**Drs. Rusli Isa, M.Si**

**MATERI YANG DISAMPAIKAN PADA SAAT FOCUS GROUP  
DISCUSSION HASIL PENELITIAN TAHAP 1 (2014)  
PADA TANGGAL 23 MEI 2015**

**INFORMASI HASIL PENELITIAN TAHUN 2014 (TAHAP 1)**

1. Pengembangan kawasan monapolitan telah dimulai sejak tahun 2008 saat pejabat Bupati Gorontalo Utara: Ir. Boni Ointu.
2. Kawasan minapolitan meliputi: Kecamatan Anggrek, sebagai kawasan Minapolis (Sentral) dan Kecamatan Kwandang dan Sumalata sebagai kawasan Hinterland (Penyangga).
3. Kelompok Kerja (POKJA) Minapolitan tahun 2014 di Ketuai oleh: Ir. Moly Ahmad, MM (Staff Khusus Bupati Gorontalo Utara Bidang Pemerintahan).
4. Perubahan secara fisik di kawasan minapolitan antara lain terlihat dari: terbukanya akses jalan, jembatan, telekomunikasi, akses pendidikan (seperti anak-anak usia sekolah mudah ke sekolah karena akses jalan dan jembatan tersebut telah terbuka), tersedianya mesin penyulingan air laut menjadi air tawar, akses ke tempat Puskesmas, dan lain-lain.
5. Perkembangan kelompok-kelompok nelayan telah sesuai harapan, baik perikanan tangkap maupun budidaya (rumput laut, udang paname, ikan kue, bandeng, bubar, dan lain-lain). Perkembangan itu dapat dilihat dari dinamika aktivitas kelompok-kelompok nelayan, seperti peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, kemampuan pengelolaan fasilitas yang diberikan, dan tumbuhnya anggota kelompok yang berusaha menjadi pedagang pengumpul diantar anggota kelompok nelayan yang ada.
6. Pemasaran hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya terkendala karena akses ke penjual masih rendah, akibatnya jika produksi sangat besar maka harga jual menjadi rendah dan juga kualitas menjadi rendah. Pelaku usaha di kalangan anggota nelayan minapolitan secara perlahan mulai tumbuh. Hal ini seperti yang ada di Desa Anggrek Kec. Anggrek (salah seorang Ketua Kelompok yang mulai menekuni usaha pedagang pengumpul rumput laut)
7. Perkembangan areal budidaya khususnya untuk rumput laut telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

**KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI KELOMPOK NELAYAN**

1. Pemasaran hasil perikanan tangkap dan budidaya yang belum memenuhi harapan. Hal ini dikarenakan produksi yang diperoleh anggota nelayan tidak menentu pada setiap hari atau bulannya.
2. Investor belum bersedia menanamkan modalnya di kawasan Minapolitan baik perikanan maupun budidaya, termasuk Bank Pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan anggota nelayan minapolitan tidak memiliki barang atau benda sebagai jaminan.

3. Belum ada Koperasi khusus nelayan yang memfasilitasi nelayan dalam hal modal usaha maupun menampung hasil tangkapan maupun budidaya.

### **TANGGAPAN PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (ANGGOTA NELAYAN MINAPOLITAN)**

1. Kendala yang dari dulu hingga sekarang dihadapi nelayan adalah pada masalah modal. Sebab setiap aktivitas yang kami lakukan seperti saat turun melakukan penangkapan ikan, maka yang dibutuhkan adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perbekalan selama melakukan perjalanan penangkapan ikan, demikian juga kegiatan budidaya untuk bibit, proses pemeliharaan, juga untuk pemeliharaan peralatan. Kebutuhan modal tersebut bukan berarti setiap kami melakukan penangkapan ikan maupun budidaya, tetapi saat-saat tertentu khususnya masa paceklik sangat terasa. Oleh karena itu kami butuh KOPERASI NELAYAN untuk membantu kami dalam hal: a) menampung hasil tangkapan dan budidaya sehingga dari hasil itu kami bisa menyimpan sebagian dari hasil yang diperoleh untuk satu saat nanti sangat diperlukan; b) mempermudah proses pemasaran hasil, sehingga produksi tidak mengalami pembusukan dan harga tetap stabil; c) menghindari dari ketergantungan kepada pedagang antara atau tengkulak. Memang disadari bahwa keberadaan tengkulak “mau tidak mau” harus kami hadapi, sebab dari aspek persyaratan administrasi tidak terlalu rumit atau kompleks. Cukup dengan perjanjian, maka apa saja yang kami peroleh (hasil tangkapan atau budidaya) harus kami setorkan ke tengkulak tersebut; demikian juga dengan d) tenaga penyuluh lapangan dalam melakukan pendampingan kepada nelayan harus lebih insentif. Hal bisa dilakukan misalnya saat para nelayan tidak turun melakukan penangkapan ikan atau budidaya (saat musim paceklik). (Komentar salah seorang anggota Nelayan juga sebagai tenaga penyuluh swadaya dari unsur nelayan sendiri: Bapak Darson)
2. Program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya untuk nelayan-nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan manfaatnya sudah kami rasakan. Hal itu seperti adanya peralatan tangkap maupun budidaya yang sudah tersebar di seluruh daerah pesisir dan telah diterima. Perubahan yang dirasakan selama ini adalah anggota nelayan telah memiliki peralatan tangkap sendiri, adanya fasilitas jalan, jembatan, listrik, fasilitas telekomunikasi seperti HP dan lain-lain. Peluang usaha yang terbuka bagi kami antara lain bisa menjadi pengumpul hasil budidaya seperti rumput laut. Hal itu telah ditekuni sejak 1 tahun yang lalu dan hasilnya sungguh menguntungkan, baik antara sesama anggota nelayan sendiri maupun nelayan-nelayan lainnya. Sejak menjadi pedagang kecil atau pengumpul khusus untuk budidaya, maka akses untuk melakukan kontak dagang dengan pihak luar telah terbuka secara perlahan. Tetapi kendalanya pada mengembangkan usaha dalam skala menengah, maka harus memerlukan modal yang besar pula. Salah satu cara yang



dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak BRI untuk membuka peluang usaha. Pihak BRI dapat memberi bantuan asalkan peminjam (anggota nelayan) yang bisa dipercaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan untuk hal itu sekarang sementara dilakukan. (Komentar salah seorang anggota nelayan yang telah menjadi pedagang pengumpul rumput laut di kalangan kelompok nelayan: Bapak Hamzah)

3. Pemerintah desa melihat bahwa keberadaan kawasan minapolitan dan adanya pemberdayaan nelayan tradisional yang dulu tidak memiliki peralatan tangkap dan budidaya, kini mereka sudah memilikinya bahkan perkembangannya sudah sangat maju. Dulunya daerah ini (kawasan minapolitan) seperti daerah terisolir jauh dari akses pasar, jalan masih jalan setapak, jika turun hujan arus transportasi terhalang tetapi dengan adanya akses jembatan maka hal itu tidak dirasakan lagi. Selain itu pertumbuhan ekonomi nelayan sudah mulai terasa perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan rumah-rumah nelayan yang dulunya masih sederhana (sebatas tidak panas saat kemarau dan tidak basah saat musim hujan), kini sebagian besar sudah permanen dan dialiri listrik, juga mereka telah memiliki motor, TV Parabola dll. (Kepala Desa Ilodulunga Ibu Hasana).

**MATERI YANG DISAMPAIKAN PADA SAAT FOCUS GROUP  
DISCUSSION HASIL PENELITIAN TAHAP 1 (2014)  
PADA TANGGAL 24 JUNI 2015**

Informasi yang disampaikan pada FGD 2 adalah hasil informasi yang dibahas bersama saat FGD tahap 1 tanggal 23 Mei 2015 di tempat yang sama yakni Balai Unit Pelayanan Pengembangan Nelayan di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Saat FGD tahap 2 dihadiri oleh:

1. Ketua POKJA Minapolitan: Ir. Molly Ahmad, MM
2. Sekretaris Dinas Kelautan & Perikanan: Isjrak, S.Pi
3. Kepala Bidang Budidaya: Nilawati Ismail, S.Pi
4. POKJA dari Bappeda: Faisal PiU
5. POKJA dari Dinas K & P: Hesti Djou
6. Camat Anggrek: Yanti Halalangi
7. Kepala Desa Ilodulunga: Hasana

Secara substansial hal-hal yang disampaikan saat FGD tahap 2 itu adalah:

1. Kelompok nelayan sangat mengapresiasi berbagai program pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara khususnya melalui program pengembangan kawasan minapolitan yang telah membawa perubahan, seperti aspek ekonomi keluarga nelayan, transportasi: jalan dan jembatan, telekomunikasi, dan lain-lain.
2. Kelompok nelayan minapolitan mengharapkan perhatian serius pemerintah dalam menata kembali kawasan minapolitan yang telah mengalami perubahan seperti berkurangnya hutan mangrove yang mempengaruhi kualitas daerah pesisir sebagai kawasan pengembangan komoditas budidaya seperti rumput laut, budidaya: udang Pemane, Karamba Jaring Apung (KJA), Karapu, Bubara, dan lain-lain. Kualitas lingkungan dimaksud adalah air sekitar pesisir keruh saat musim hujan.
3. Untuk budidaya rumput laut yang menjadi komoditas unggulan di kawasan minapolitan sering mengalami serangan hama, sehingga hasil produksi tidak sesuai target capaian. Hasilnya nelayan mengalami kerugian, karena hasil yang diperoleh tidak dapat menutupi modal awal yang telah dikeluarkan.
4. Permasalahan yang dikemukakan pada point 3 dan 4 di atas perlu dicermati oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya POKJA Minapolitan untuk secara bersinergi menyelesaikan permasalahan tersebut. POKJA yang terbentuk sudah cukup komprehensif karena melibatkan berbagai SKPD yang dapat menopang keberhasilan kawasan minapolitan yang menjadi program nasional.

## **TANGGAPAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO UTARA**

### **Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Gorut: Isjrak, S.Pi**

1. Komoditas unggulan di kawasan minapolitan saat ini (2015) dan kedepan diarahkan pada komoditas unggulan disamping komoditas lainnya. Komoditas unggulan itu adalah rumput laut. Jenis rumput laut yang akan dikembangkan adalah jenis rumput laut **Cotoni** yang memiliki keunggulan dalam perubahan iklim. Jenis rumput laut ini didatangkan dari Kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Makassar. Rumput laut ini dapat dibudidayakan sepanjang tahun dan sangat cocok untuk wilayah Gorontalo Utara dimana daerah pesisir dibatasi oleh pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil itu sebagai pemecah ombak, sehingga hamparan rumput laut yang dibudidayakan tidak mengalami kerusakan.
2. Rekeyasa areal budidaya rumput laut akan dilakukan secara dinamis. Artinya akan dilakukan relokasi budidaya rumput laut untuk menghasilkan hasil yang optimal. Dalam konteks ini akan dilibatkan Perguruan Tinggi dalam melakukan uji kualitas air di areal yang akan menjadi lokasi budidaya rumput laut hasil relokasi.
3. Catatan untuk nelayan budidaya rumput laut:
  - a. Perlu kesungguhan nelayan termasuk mencari solusi secara bersama dalam menghadapi permasalahan; seperti: menghubungi petugas atau penyuluh jika menghadapi permasalahan di lapangan.
  - b. Partisipasi nelayan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara bergotong royong, seperti menjaga kelestarian hutan mangrove, bahkan menginisiasi di antara nelayan atau masyarakat pesisir menanam kembali hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Dalam hal ini Pihak Pemerintah akan membantu dalam hal penyediaan bibit dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

### **Kepala Bidang Budidaya: Nilawati Ismail, S.Pi**

1. Potensi alam Gorontalo Utara dalam Peningkatan dan pengembangan program minapolitan adalah panjang pantai  $\pm$  320 KM
2. Pemberian bantuan modal agar dimanfaatkan dengan baik dan harus dipertanggungjawabkan. Pemberian bantuan tidak berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat sebagai nelayan. Bantuan ini sebagai upaya penguatan SDM nelayan sehingga menjadi nelayan pengusaha yang mandiri dan bertanggungjawab. Kesungguhan dan kesadaran masyarakat nelayan menjadi penting dalam setiap program pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat.
3. Infra struktur yang telah ada harus dipelihara dengan baik untuk kepentingan bersama khususnya untuk generasi berikutnya.

4. Untuk mempertahankan kawasan minapolitan sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap dan budidaya akan diupayakan adanya PERDA tentang “Kawasan pesisir”. Ide tentang PERDA ini adalah hasil diskusi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, POKJA dan Tim Peneliti sebagai upaya strategis penguatan Gorontalo Utara sebagai Kawasan Minapolitan yang memiliki 75% daerah pesisir dan pantai (320 KM panjang pantai).

**Ketua POKJA Minapolitan: Ir. Moli Ahmad, MM**

1. Potensi Gorontalo Utara dalam pengembangan kawasan minapolitan cukup besar, hal ini karena secara nyata Gorut memiliki panjang pantai sepanjang 320 KM. Potensi alam ini harus dijaga kelestariannya dengan baik. Masyarakat nelayan tidak sebatas melakukan penangkapan ikan dan budidaya, tetapi sekaligus menciptakan lingkungan yang memungkinkan peningkatan hasil yang diperoleh. Masyarakat nelayan dapat mencari solusi secara mandiri tentunya berkoordinasi dengan Dinas Terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya.
2. Keberadaan nelayan saat ini telah mengalami banyak perubahan, baik dari aspek transportasi, komunikasi, peluang usaha, akses pendidikan, kesehatan, maupun hal-hal kemudahan dalam menyampaikan berbagai aspirasi telah mudah dilakukan. Buktinya adalah adanya Balai Penyuluhan dan Pengembangan Nelayan ini sebagai sesuatu yang luar biasa, betapa tidak jika nelayan saat ini tidak memiliki jaringan antara sesama nelayan dalam suatu daerah atau jaringan dengan daerah lain, maka itu gambaran nelayan masa 10 atau 15 tahun yang lalu. Oleh karena itu pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas yang terkait dengan pemberdayaan nelayan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Bupati dan atau Wakil Bupati, unsur DPRD dan lainnya sangat mensupport usaha dan kerja keras nelayan. Hal yang penting adalah nelayan tidak pada posisi “Minta diberdayakan secara terus menerus, tetapi mampu menjangkitkan keberhasilan yang diraihinya kepada nelayan lainnya yang belum berhasil.
3. POKJA siap memediasi berbagai persoalan sepanjang hal itu terkait dengan keinginan dan semangat pemajuan nelayan kearah yang mandiri dan bertanggungjawab.

**TANGGAPAN NELAYAN MINAPOLITAN**

**Ketua Kelompok Maju Bersama I: Roys Suno**

1. Untuk membangkitkan para pembudidaya rumput laut, maka ada beberapa hal yang perlu perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Gorut, yaitu:
  - a. Standar harga rumput laut di tingkat nelayan setempat, baik rumput laut basah maupun rumput laut kering;

- b. Jenis rumput laut yang menjadi unggulan perlu disosialisasikan agar pembudidaya mempunyai pilihan untuk mengembangkannya.
2. Untuk mensupport pedagang pengumpul di kalangan nelayan sendiri perlu difasilitasi melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini penting untuk menghindari ketergantungan pada tengkulak yang selama ini menjadi pilihan.

**Catatan Tim Peneliti dari hasil FGD Tahap I dan Tahap II sebagai bentuk Rekomendasi ke Pemerintah Daerah Gorontalo Utara di Kawasan Minapolitan.**

1. Semangat nelayan dalam berusaha dibidang perikanan tangkap dan budidaya sangat tinggi, hal itu terjadi karena:
  - a. Peluang usaha semakin terbuka luas disebabkan akses transportasi jalan dan jembatan, akses komunikasi, akses pendidikan dan kesehatan telah terbuka dengan baik.
  - b. Fasilitas berupa peralatan tangkap dan budidaya sudah sangat memadai.
  - c. Telah tumbuh nelayan-nelayan muda yang produktif sebagai sinyal bahwa dunia nelayan tetap prospektif.
2. Modal social berupa praktek bergotong royong perlu dibangkitkan kembali untuk menghindari praktik pembiaran terhadap lingkungan yang semakin hari semakin rusak. Praktek gotong royong itu dilakukan dalam bentuk:
  - a. Melakukan penanaman mangrove di sepanjang daerah pesisir yang menjadi kawasan minapolitan.
  - b. Melakukan penanaman pohon (reboisasi) pada daerah-daerah pegunungan sepanjang pesisir.
3. Dalam upaya pelestarian daerah pesisir dan pantai yang sangat potensial agar tidak mengalami kerusakan parah di masa depan, maka perlu dibuat suatu peraturan daerah (PERDA) yang mengatur tentang daerah pesisir dan pantai dimaksud. Sebab kenyataannya daerah sepanjang pesisir dan pantai telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Cara yang dapat dilakukan adalah:
  - a. Membebaskan kepada kelompok-kelompok nelayan yang telah difasilitasi untuk melakukan penanaman tanaman mangrove dan tanaman pohon di sepanjang pantai dan pesisir pada kawasan minapolitan.
  - b. Masing-masing kelompok diberi target tentang kawasan yang menjadi target penanaman, serta memberi laporan secara periodic kepada Instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (Bupati atau Wakil Bupati).
  - c. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, generasi muda untuk melakukan Gerakan Peduli Lingkungan Hijau untuk menciptakan lingkungan Hijau di Kabupaten Gorontalo Utara.

4. Untuk menjaga kelestarian pesisir dan pantai perlu dilakukan juga penanaman pohon di lingkungan sekolah-sekolah yang ada di sekitar pesisir dan pantai dengan cara:
  - a. Mewajibkan setiap anak SD, mulai dari kelas 1 s.d 6 untuk melakukan penanaman pohon di sekitar sekolah atau di lingkungan rumahnya masing-masing. Hal untuk memudahkan dalam mengontrol tentang kegiatan tersebut, maka setiap anak membuat portofolio perkembangan tanaman yang ditanamnya. Pertimbangan untuk anak SD adalah sebagai upaya penanaman karakter “Peduli lingkungan” sejak dini.
  - b. Point (a) dimaksud pada 5 tahun berikutnya akan nampak hasil dari apa yang mereka usahakan, yaitu tumbuhnya pohon-pohon hijau karya anak SD. Tujuannya agar terjadi koneksitas antara tanaman yang ditanam di darat dan tanaman yang ditanam di daerah pesisir dan pantai oleh masyarakat nelayan.
5. Point 1 s.d 4 di atas akan memberikan corak: **Gorontalo Utara sebagai Kawasan Minapolitan yang Hijau dan Lestari.**

**DOKUMEN FOTO**















































## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusrodapaja Kompleks Blok Plan Melinggapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/Kesbangpol-Rekom/ 25 /III/2015

Memperhatikan surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Gorontalo lembaga Penelitian Nomor : 11/UN47.D2/PL/2015 Tanggal 11 Maret 2015 Perihal permohonan rekomendasi Penelitian, maka dengan ini Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara memberikan rekomendasi lanjutan penelitian kepada :

Nama	: 1. Dr. Sukaman Kamull, M.Si (Ketua Peneliti)
	2. Rauf A Hatu, M.Si (Anggota)
	3. Drs. Rusli Isa, M.Si (Anggota)
Asal Instansi	: Universitas Negeri Gorontalo
Tujuan	: Untuk melaksanakan penelitian hibah bersaing di Kab. Gorontalo Utara
Judul Penelitian	: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Gorontalo Utara.
Lama Penelitian	: 8 Bulan (April s.d November) 2015.

Dalam melakukan penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian agar melapor ke Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat rekomendasi sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil penelitian agar diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Gorontalo Utara C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 12 Maret 2015  
**KEPALA BADAN**  
  
**ABDUL WAHAB PAUDI, S.IP. M.AP**  
 Np. 19670822 199203 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kab. Gorontalo Utara
3. Kepala Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo Utara
4. Kepala Perikanan dan Kelautan Kab. Gorontalo Utara
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.